



PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG

**Lampiran XII Peraturan Walikota Padang Panjang  
Nomor 19 Tahun 2025  
Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah  
Tahun 2025-2029**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA PADANG PANJANG**



## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kota Padang Panjang dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Padang Panjang, September 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Padang Panjang



**DRS AMPERA, SH.MSi**

NIP.196801011998031010

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	10
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika .....	10
A. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	12
B. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika .....	12
C. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Aplikasi, Informatika, dan Persandian.....	13
D. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik. ....	14
E. UPTD .....	16
2.1.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika .....	18
A. Kondisi Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika .....	18
B. Kondisi Sarana Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika .....	19
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	31
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika ...	41
2.1.5 Mitra Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pemberian pelayanan	42
2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika .....	42
1. PDAM Tirta Serambi.....	42
2. Bank Nagari (BUMD Perbankan Daerah) .....	43
2.1.7 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika.....	43
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika .....	44
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	44
2.2.2 Isu-isu strategis .....	48
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>60</b>
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 .....	60
3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan.....	64
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>66</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>90</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pegawai berdasarkan Eselon/ Jabatan	18
Tabel 2.2 Pegawai ASN Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	19
Tabel 2.3 Pegawai Non ASN Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	19
Tabel 2.4 Jumlah Aset yang dimiliki dan Jumlah Aset yang tidak dipakai	20
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan	32
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	34
Tabel 2.7 Kelompok Sasaran Layanan	41
Tabel 2.8 Mitra Dinas Komunikasi dan Informatika	42
Tabel 2.9 Pemetaan Permasalahan Pelayanan	44
Tabel 2.10 Pemetaan Isu Strategis Dinaskomunikasi dan Informatika	51
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika 2025 - 2029	61
Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika	63
Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, strategi, dan Arah Kebijakan	64
Tabel 4.1 Teknis merumuskan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika	67
Tabel 4.2 Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Diskominfo	79
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas	89
Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Unggulan dalam mendukung Program Unggulan	91
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika	93
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika	94

## DAFTAR GAMBAR

I.	Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi	.....17
----	--------------------------------------	---------

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian serta tugas pembantuan yang diberikan. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang yang berlandaskan pada RPJMD Kota Padang Panjang berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Pemerintah Kota Padang Panjang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kota Padang Panjang berkaitan dengan Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik, dan Urusan Persandian.

Dalam menyusun Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah, Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kota serta memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Padang Panjang.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);
  5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Nomor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);

19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 4);
22. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.
23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Nomor 2);

Selain peraturan perundang-undangan di atas, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika juga mempedomani beberapa ketentuan berikut, diantaranya:

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Menyediakan dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Padang Panjang;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kota Padang Panjang dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai

selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang;

2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.

##### **1.1 Latar Belakang**

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.

##### **1.2 Landasan Hukum**

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

##### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD tahun 2025-2029.

##### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD tahun 2025-2029.

## **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat informasi gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah antara lain:

- 2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.
  - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika.
  - 2.1.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika.
  - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.
  - 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.
  - 2.1.5 Mitra Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pemberian pelayanan.
  - 2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
  - 2.1.7 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 2.2 Permasalahan dan Isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika
  - 2.2.1 Permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
  - 2.2.2 Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

## **BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 – 2029.
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mencapai Tujuan dan Sasaran.

## **BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

- 4.1 Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika.

## **BAB V. PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.**

##### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang. maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian serta tugas pembantuan yang diberikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
  - a) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat;
  - a) Sekretariat yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat membawahi Subbagian Umum dan Kepegawaian serta kelompok jabatan fungsional Sub Substansi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - b) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - c) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan bidang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c terdapat kelompok jabatan fungsional dan atau pelaksana berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
3. Bidang;
  - a) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c , masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
    - Bidang Aplikasi, Informatika, dan Persandian
    - Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik.
4. UPTD;
  - a) UPTD sebagaimana yang dimkasud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh kepala UPTD yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **A. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika**

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Pelaporan.
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **B. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika**

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1), mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian program kegiatan bidang.
- b. pengoordinasian penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian dinas.
- c. Pengoordinasian penyusunan analisis jabatan dan beban kerja.
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan asset dinas.
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan dinas.
- f. Pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas.

- g. Pengkoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, inovasi, system pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan dinas.
- h. Pengkoordinasian fasilitasi tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan.
- i. Pengkoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan dinas.
- j. Penatausahaan keuangan dinas.
- k. Pengelolaan perbendaharaan dinas.
- l. Pelaksanaan akuntansi keuangan dan asset dinas.
- m. Pelaksanaan verifikasi pertanggung jawaban keuangan dinas.
- n. Penyusunan pertanggung jawaban keuangan dinas, dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, sekretariat terdiri dari;

- Subbagian Umum dan Kepegawaian yang di kepalai oleh kepala Sub bagian umum dan kepegawian.
- Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan yang di kepalai oleh Sub Koordinator Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan.

### **C. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Aplikasi, Informatika, dan Persandian.**

Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan Aplikasi, Informatika, dan Persandian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik pada layanan publik dan administrasi.
- b. pengkoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait Aplikasi Informatika dan Persandian.
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian.
- d. pengkoordinasian perencanaan teknis infrastruktur teknologi dan persandian.

- e. pengkoordinasian pelaksanaan teknis infrastruktur teknologi dan persandian.
- f. pengkoordinasian pembuatan laporan dan evaluasi teknis infrastruktur teknologi dan persandian.
- g. pengkoordinasian perencanaan teknis layanan aplikasi.
- h. pengkoordinasian pelaksanaan teknis layanan aplikasi.
- i. pengkoordinasian pembuatan laporan dan evaluasi teknis layanan aplikasi.
- j. pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian.
- k. pengkoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian.
- l. peningkatan komitmen, efektivitas, dan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi.
- m. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.
- n. pengkoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian.
- o. pengkoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian.
- p. pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian.
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

**D. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik.**

Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian perencanaan program kerja Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik.
- b. pengkoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait Informasi Komunikasi Publik dan Statistik.
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik.
- d. pengkoordinasian perencanaan teknis pengelolaan informasi publik.
- e. pengkoordinasian pelaksanaan teknis pengelolaan informasi publik.
- f. pengkoordinasian pembuatan laporan dan evaluasi teknis pengelolaan informasi publik.
- g. pengkoordinasian perencanaan teknis pengelolaan komunikasi publik.
- h. pengkoordinasian pelaksanaan teknis pengelolaan komunikasi publik.
- i. pengkoordinasian pembuatan laporan dan evaluasi program dan kegiatan pengelolaan komunikasi publik.
- j. pengkoordinasian perencanaan teknis dokumentasi dan hubungan media.
- k. pengkoordinasian pelaksanaan teknis dokumentasi dan hubungan media.
- l. pengkoordinasian pembuatan laporan dan evaluasi program dan kegiatan dokumentasi dan hubungan media.
- m. pengkoordinasian perencanaan teknis urusan statistic.
- n. pengkoordinasian pelaksanaan teknis urusan statistic.
- o. pengkoordinasian pembuatan laporan dan evaluasi teknis urusan statistic.
- p. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan statistik sektoral yang mendukung pelaksanaan sistem statistik nasional.
- q. penyediaan data statistik sektoral yang berkualitas.
- r. pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik.
- s. pengkoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik.
- t. pengkoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik.
- u. pengkoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik.

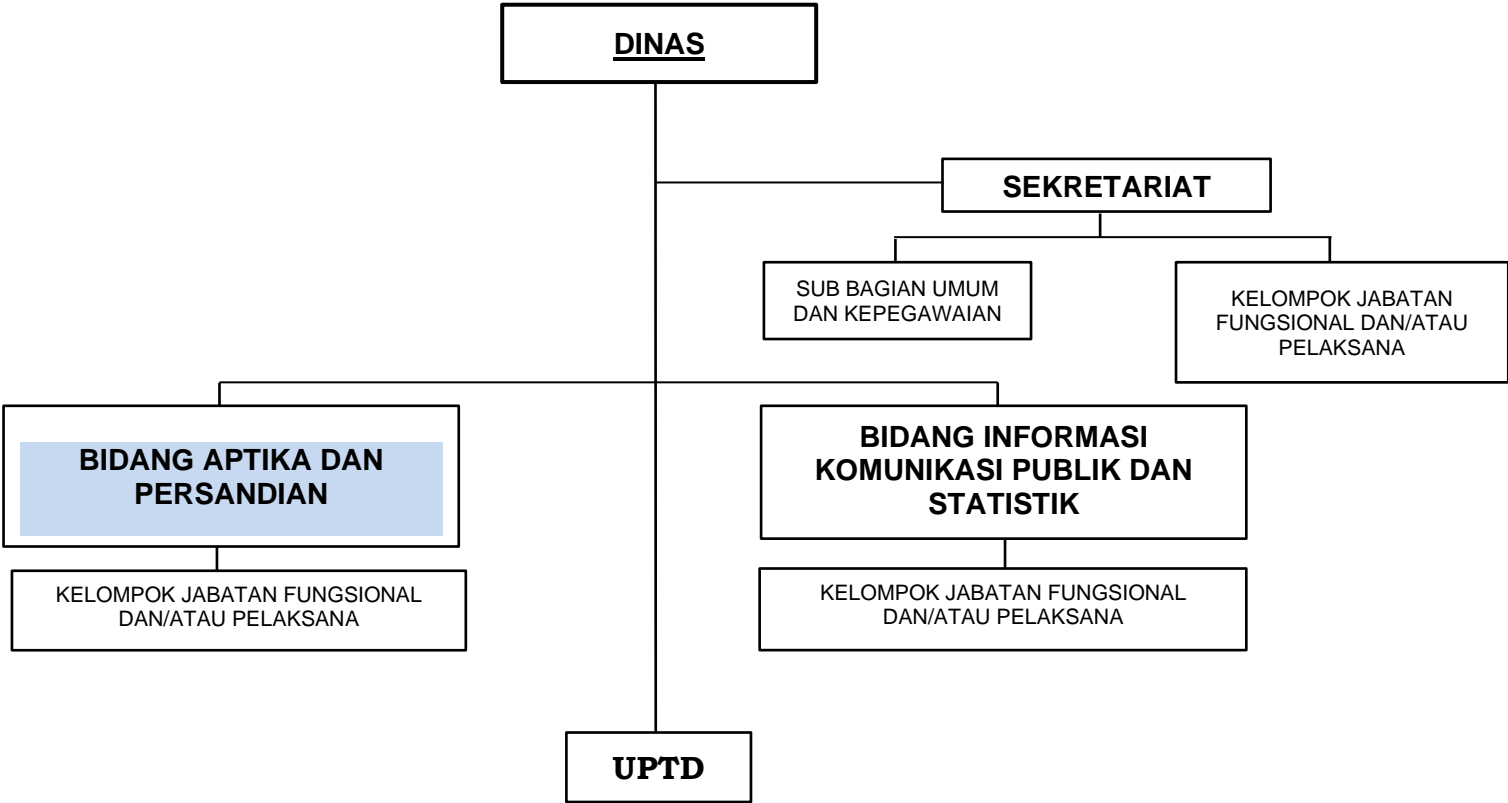
- v. pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik.
- w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

#### **E. UPTD**

Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas dibentuk UPTD. Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang sebagaimana Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

**Gambar 2.1**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG**



## 2.1.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

### A. Kondisi Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, struktur kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari kelompok ASN dan Non ASN. Secara komposisi, dari 53 Orang pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika 27 orang merupakan ASN dan selebihnya 26 orang berasal dari tenaga harian lepas (THL). Lebih lanjut kondisi kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Pegawai berdasarkan Eselon/Jabatan**

No.	Uraian	Jumlah
1	Eselon II	1 orang
2	Eselon III	3 orang
3	Eselon IV.a	1 orang
4	Jabatan Fungsional Keahlian	11 orang
5	Jabatan Fungsional Umum	11 orang
6	Non ASN	26 orang

Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Pegawai ASN Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**

No.	Uraian	Jumlah
1	Strata II	3 orang
2	Strata I	13 orang
3	Diploma III	8 orang
4	SLTA	2 orang

Dari tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai latar belakang Pendidikan Strata 1/Sarjana dan Pendidikan keahlian teknis/D3.

**Tabel 2.3**  
**Pegawai Non ASN Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**

No.	Uraian	Jumlah
1	Strata II	1 orang
2	Strata I	12 orang
3	Diploma III	5 orang
4	SLTA	10 orang

Begitu juga dengan pegawai non ASN, mayoritas berpendidikan strata 1 dan SLTA, diikuti dengan Pendidikan teknis/diploma III dan strata 2 . Hal ini menjadikan cukup banyaknya variasi jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai non ASN.

#### **B. Kondisi Sarana Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika**

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)**

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Ket
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
	<b>TANAH</b>						
1	Tanah bangunan kantor pemerintah/2005	1	1.979.550.000	406 m2/Jln.M.Yamin,SH No.02/mutasi Pol PP 2018	-	-	-
	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>						
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen2008	1	939.760.000	399 m2/Jln.M.Yamin,SH No.02/mutasi Pol PP 2018	-	-	-
3	Gedung Garasi/pool semi1/2010	1	69.545.454	60 m2/Depan kantor/mutasi Pol PP 2018	-	-	-
4	Gedung Garasi/pool semi2/2010	1	59.454.546	72 m2/Samping kantor/mutasi Pol PP 2018	-	-	-
	<b>INSTALASI</b>						
5	Instalasi jaringan SIPKD/2010	1	9.619.000	Kabel LAN/mutasi Pol PP 2018	-	-	-
	<b>ALAT ANGKUTAN</b>						
6	Station Wagon/2004	1	140.000.000	Mitsubishi Colt L300 Diesel/BA 1842 N/mutasi SDK 2017	-	-	-
7	Station Wagon/2008	1	188.300.000	Toyota Innova 2.0 G/BA 34 N/mutasi BPKD 2017	-	-	-
8	Station Wagon/2004/mutasi 2019	1	130.000.000	Toyota Avanza G/BA 1735 NC/mutasi BPKD 2019	-	-	-
9	Sepeda motor/2015/mutasi 2018	1	17.113.100	Honda Vario Tech.125 CBS/BA 3776 N/mutasi BPKD 2018	-	-	-
10	Sepeda motor/2015/mutasi 2018	1	17.113.100	Honda Vario Tech.125 CBS/BA 3782 N/mutasi BPKD 2018	-	-	-
11	Sepeda motor/2005/mutasi 2018	1	12.000.000	Honda Kharisma 125 ND/BA 2252 N/mutasi BPKD 2018	-	-	-
12	Sepeda motor/2009/mutasi 2018	1	13.545.000	Suzuki Shogun 125 RCD/BA 2192 N/mutasi BPKD 2018	-	-	-
13	Sepeda motor/2009/mutasi 2018	1	13.545.000	Suzuki Shogun 125 RCD/BA 2343 N/mutasi BPKD 2018	-	-	-
	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>						
14	Rak Kayu/2005	1	1.540.000	Gudang darurat/belakang	-	-	-

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Ket
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
				dapur/mutasi Pol PP 2018			
15	Meja Kerja Kayu/2010	1	1.650.000	Kayu/mutasi Pertanian & KTP 2017	-	-	-
16	Meja Kerja Kayu/2010	1	1.650.000	Kayu/mutasi Pertanian & KTP 2017	-	-	-
17	Meja 1/2 Biro/2008	1	929.500	Kayu/mutasi Pertanian & KTP 2017	-	-	-
18	Meja 1/2 Biro/2008	1	929.500	Kayu/mutasi Pertanian & KTP 2017	-	-	-
19	Meja 1/2 Biro/2008	1	929.500	Kayu/mutasi Pertanian & KTP 2017	-	-	-
20	Meja 1/2 Biro/2008	1	929.500	Kayu/mutasi Dishub 2017	-	-	-
21	Filing kabinet/2007	1	2.375.000	Awiko/mutasi Dishub 2017	-	-	-
22	Filing kabinet/2011	1	2.040.000	Montana/mutasi Dishub 2017	-	-	-
23	Meja Biro/2009	1	1.702.800	Kayu/mutasi Dishub 2017	-	-	-
24	Meja Biro/2009	1	1.702.800	Kayu/mutasi Dishub 2017	-	-	-
25	Meja Biro/2012	1	1.600.000	Kayu/mutasi Dishub 2017	-	-	-
26	Meja 1/2biro/Alat ktr lain/2009	1	919.710	Kayu/mutasi Dishub 2017	-	-	-
27	Meja 1/2biro/Alat ktr lain/2009	1	919.710	Kayu/mutasi Dishub 2017	-	-	-
28	Meja 1/2biro/Alat ktr lain/2009	1	919.710	Kayu/mutasi Dishub 2017	-	-	-
29	Meja 1/2biro/Alat ktr lain/2009	1	919.710	Kayu/mutasi Dishub 2017	-	-	-
30	Kursi kerja pegawai non struktural/2009	1	1.683.000	Tinggi/Fantoni /mutasi Dishub 2017	-	-	-
31	Kursi kerja pegawai non struktural/2009	1	1.683.000	Tinggi/Fantoni/mutasi Dishub 2017	-	-	-
32	Kursi kerja pejabat eselon IV/2009	1	3.327.500	Tinggi/Fantoni/mutasi Dishub 2017	-	-	-
33	Kursi kerja pegawai non struktural/2012	1	1.300.000	Tinggi/Fantoni/mutasi Dishub 2017	-	-	-
34	Lemari makan/2005	2	3.080.750	Kayu/mutasi Dishub 2017	-	-	-
35	Komputer PC/2009	1	9.950.000	Acer/mutasi Dishub 2017	-	-	-
36	Komputer PC/2009	1	19.900.000	Acer/mutasi Dishub 2017	-	-	-
37	Komputer PC/2013	1	8.755.000	hp pavilion PG-2343L/mutasi Dishub 2017	-	-	-
38	Notebook/2014	1	7.500.000	Sony vaio/mutasi Dishub 2017	-	-	-
39	Netbook/2014	1	4.000.000	Acer Aspire V5-132/mutasi	-	-	-

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Ket
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
				Dishub 2017			
40	Notebook/2016	1	12.708.150	Lenovo/mutasi Dishub 2017	-	-	-
41	Hardisk/2016	1	4.581.100	Western Digital/WD/mutasi Dishub 2017	-	-	-
42	UPS/2008	1	750.000	Backup listik/Prolink/mutasi Dishub 2017	-	-	-
43	UPS Server/2015	1	26.200.000	Backup listik/APC smart 3000/mutasi Dishub 2017	-	-	-
44	Videotron/2015	1	1.429.885.000	Absen/Novastar/mutasi Dishub 2017	-	-	-
45	Videotron/2016	1	1.444.405.000	Absen/Novastar/mutasi Dishub 2017	-	-	-
46	Komputer server/2016	1	36.860.100	hp proliant ML10/mutasi Dishub 2017	-	-	-
47	Komputer server/2016	1	71.759.750	hp proliant DL380/mutasi Dishub 2017	-	-	-
48	Komputer server/2015	1	49.635.000	Dell 320/mutasi Dishub 2017	-	-	-
49	Komputer server/2015	1	49.780.000	Dell 320/mutasi Dishub 2017	-	-	-
50	Komputer server/2015	1	49.780.000	Dell 320/mutasi Dishub 2017	-	-	-
51	Kabel fiber optik/2015	1	216.094.000	Hitam fo (kabel peralatan jaringan)/mutasi Dishub 2017	-	-	-
52	Video Recorder/Kamera/2016	1	37.757.500	Canon EOS 7D/mutasi Dishub 2017	-	-	-
53	Router server/Router mikrotik/2012	1	24.800.000	Mikrotik ainos/mutasi Dishub 2017	-	-	-
54	Router server/Router mikrotik/2012	1	24.800.000	Mikrotik ainos/mutasi Dishub 2017	-	-	-
55	Router board/Router node/2016	1	2.847.000	RB 951 F1/mutasi Dishub 2017	-	-	-
56	Hub/Desktop swicth/2012	1	4.900.000	HP 24p/mutasi Dishub 2017	-	-	-
57	Hub/Desktop swicth/2012	1	4.900.000	HP 24p/mutasi Dishub 2017	-	-	-
58	Stabilizer voltase/2012	1	4.900.000	Matsunaga/mutasi Dishub 2017	-	-	-
59	GPS/HT/2012	1	2.925.000	Garmin/mutasi Dishub 2017	-	-	-
60	Router mikrotik/CCR/2016	1	17.147.500	CC 1036-12G-45/mutasi Dishub 2017	-	-	-
61	Router mikrotik/CCR/2016	1	20.964.500	CC 1036-12G-45-EM/mutasi Dishub 2017	-	-	-

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Ket
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
62	Antena radio wireless/2013	19	28.500.000	Ubiquity/mutasi Dishub 2017	-	-	-
63	Antena Sektoral/2013	1	16.885.000	Barat-Timur/Ubiquity/mutasi Dishub 2017	-	-	-
64	Meja rapat/2004	16	8.256.000	Kayu/mutasi ltko 2017	-	-	-
65	Meja 1/2 biro/2004	1	202.493	Kayu/mutasi ltko 2017	-	-	-
66	Kursi tamu/2003	1	2.268.000	Kayu+busa/mutasi ltko 2017	-	-	-
67	Kursi kerja pegawai non struktural/2010	2	1.706.000	Donati/mutasi ltko 2017	-	-	-
68	Kursi kerja pegawai non struktural/1998/1988	4	956.252	Donati/mutasi ltko 2017	-	-	-
69	Kursi kerja pejabat eselon IV/2004	4	2.151.416	Donati/mutasi ltko 2017	-	-	-
70	Mesin absensi/2017	1	3.817.000	Revo 156 BNC/mutasi BKPSDM 2017	-	-	-
71	Handycam/2011	1	5.000.000	Sony DCR-SR68/mutasi Setdako 2019	-	-	-
72	Harddisk (4TB)/2015	1	8.875.000	Western Digital/mutasi Setdako 2019	-	-	-
73	Drone (Air video kamera) 2015	1	19.679.750	DJI Phantom 3Pro/mutasi Setdako 2019	-	-	-
74	Lensa kamera/2015	1	11.250.000	Tokina11-16,18-300+filter/mutasi Setdako 2019	-	-	-
75	Speaker Ramsa/2017	1	2.920.000	Kurzwell/mutasi Setdako 2019	-	-	-
76	Studio Light signal/flash kamera/2017	1	3.450.000	Yong Nuo/mutasi Setdako 2019	-	-	-
77	Microphone+headset/2017	1	3.900.000	Samson/mutasi Setdako 2019	-	-	-
78	Battery charger/2017	1	2.380.000	DJI Phantom 3Pro 4400Mh/mutasi Setdako 2019	-	-	-
79	Peralatan drone/2017	1	10.990.000	DJI Phantom 3Pro MM1A/GL100A/mutasi Setdako 2019	-	-	-
80	Video kamera/2017	1	23.950.000	Sony/mutasi Setdako 2019	-	-	-
81	Kamera digital+lensa/2017	1	33.775.000	Nikon D750/mutasi Setdako 2019	-	-	-
82	Stabilizer kamera elektronik/2017	1	8.900.000	DJI Osmo Mobile Silver/mutasi Setdako 2019	-	-	-
83	Tripot kamera/2017	2	3.950.000	Excell/mutasi Setdako 2019	-	-	-
84	Tripot kamera/2017	1	4.950.000	King Joy/mutasi	-	-	-

No.	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Ket
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
				Setdako 2019			
85	Trigger (Flash kamera) 2017	1	975.000	Yong Nuo/mutasi Setdako 2019	-	-	-
86	Soundcard recording/2017	1	1.490.000	M-Audio (M-Track plus)/mutasi Setdako 2019	-	-	-
87	Mixer/2017	2	5.980.000	Jk Coustic (8 channel)/mutasi Setdako 2019	-	-	-
88	AC unit /Window/2014	1	7.000.000	Panasonic/mutasi Setdako 2021	-	-	-
89	Kamera elektronik/2015	1	16.650.000	Nicon/mutasi Setdako 2021	-	-	-
90	Personal Komputer multimedia/2017	2	21.800.000	Lenovo (FOCB)/BM smt I	-	-	-
91	Personal Komputer multimedia/2017	2	49.500.000	NeoTech Apache (PC rakitan)/BM smt II	-	-	-
92	Printer/2017	3	4.500.000	Fuji Xerox (DocuPrint P115w)/BM smt II	-	-	-
93	Router board/2017	45	93.150.000	Mikrotik RB450G/BM smt II	-	-	-
94	Panel LED (Panel rakitan)/2017	8	1.697.769.640	Absen SMD2727/BM smt II	-	-	-
95	PC/CPU server (custom)/2017	1	26.361.500	WS Core i7/BM smt II	-	-	-
96	UPS/2017	1	715.000	Backup listrik/Custom/BM smt II	-	-	-
97	Box panel fan/2017	1	2.200.000	Custom/BM smt II	-	-	-
98	Electrical box panel 32A/2017	1	15.000.000	Custom/BM smt II	-	-	-
99	Electrical box panel 50A/2017	1	10.000.000	Custom/BM smt II	-	-	-
100	AVR 10000VA/2017	1	7.250.000	Custom/BM smt II	-	-	-
101	CCTV outdoor NVR/2017	1	3.000.000	Custom/BM smt II	-	-	-
102	Amplifier CCTV/2017	1	1.650.000	TOA ZA2060/BM smt II	-	-	-
103	Speaker ceiling/2017	1	1.100.000	TOA ZS646R/BM smt II	-	-	-
104	Penangkal petir/2017	8	17.600.000	Custom/BM smt II	-	-	-
105	Panel LED (Panel rakitan)/2017	8	1.697.769.640	Absen SMD2727/BM smt II	-	-	-
106	PC/CPU server (custom)/2017	1	26.361.500	WS Core i7/BM smt II	-	-	-
107	Meja 1/2 biro/2018	2	6.600.000	Expo MDJ/MB/MDH/BM smt I	-	-	-
108	Meja 1/2 biro/2018	8	10.400.000	Expo MTM3001/BM smt I	-	-	-
109	Sofa/2018	1	11.000.000	Gresco Ls06/BM smt I	-	-	-

No.	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Ket
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
110	Kursi tangan/2018	2	7.300.000	Gresco/BM smt I	-	-	-
111	Kursi putar/2018	8	11.360.000	Gresco GS202M/BM smt I	-	-	-
112	Kursi rapat/2018	20	13.000.000	Chairman VC-02/BM smt I	-	-	-
113	Gorden/2018	1	24.600.000	41 m/Momos GBP-123/BM smt I	-	-	-
114	Mesin Fax/2018	1	4.197.000	Canon L-170AE/BM smt I	-	-	-
115	Printer Scanner/2018	4	10.200.000	Brother DCP-T130/BM smt I	-	-	-
116	Proyektor/2018	1	21.500.000	IN 1118 HD/BM smt I	-	-	-
117	UPS/2018	4	3.300.000	ICA-CP700/BM smt I	-	-	-
118	Personal Komputer/2018	3	36.000.000	Lenovo V520-151KL/BM smt I	-	-	-
119	Laptop/notebook/2018	4	46.656.400	Asus A44-2UF/BM smt I	-	-	-
120	Lemari kaca 2P/2018	5	18.000.000	BJP-2P/BM smt I	-	-	-
121	Televisi/2018	1	6.150.000	Sharp/BM smt I	-	-	-
122	Access point/2018	30	39.420.000	Unifi APAC Lite/BM smt I	-	-	-
123	Laptop/notebook/2018	7	81.648.700	Asus A44-2UF/BM smt I	-	-	-
124	Laptop/notebook/2018	1	22.790.000	Asus ROG 62553 VE/BM smt I	-	-	-
125	Laptop/notebook/2018	1	24.150.000	Apple Macbook pro MPX T2/BM smt I	-	-	-
126	Drone/air video camera/2018	1	24.970.000	DJI Phantom 4 Pro/BM smt I	-	-	-
127	Kamera/2018	1	74.990.000	Fuji Film XT2/BM smt I	-	-	-
128	Router Mikrotik/2018	1	20.000.000	Cloud Core 1036/BM smt I	-	-	-
129	Box panel/2018	43	21.500.000	Diamond/BM smt I	-	-	-
130	Alat pemadam portabel 6 Kg/2018	2	1.600.000	Tabung Damkar/Viking AV-60P/BM smt II	-	-	-
131	Besi Teralis/2018/2018	1	2.500.000	BA-PT/BM smt II	-	-	-
132	Papan nama instansi/2018	1	10.500.000	NI-Adv/BM smt II	-	-	-
133	Papan pengumuman/2018	1	980.000	RP-1P/BM smt II	-	-	-
134	Mic wireless/2018	1	5.528.100	Aubern audio portable/BM smt II	-	-	-
135	Meja biro/2018	2	5.000.000	MTH-150/BM smt II	-	-	-
136	Kursi tangan/2018	2	7.300.000	Donati/BM smt II	-	-	-
137	Lemari arsip (Panjang) 4P/2018	1	7.500.000	RP-4P/BM smt II	-	-	-
138	Televisi 43 inchi/2018	2	11.992.000	LG/BM smt II	-	-	-
139	Layar infokus 84 inchi/2018	1	1.250.200	Datalite/BM smt II	-	-	-

No.	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Ket
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
140	CCTV kantor/2018	7	13.090.560	Hikvision Exir/mini bullet/BM smt II	-	-	-
141	Slinger (Merah Putih)/2018	1	9.900.000	60m/SL-1708/BM smt II	-	-	-
142	AC unit/Window/2018	3	13.800.000	Panasonic/BM smt II	-	-	-
143	CCTV (outdoor) PTZ/2018	3	46.836.300	Hikvision/IR Speed dome/BM smt II	-	-	-
144	NVR (Network Video Recorder)/2018	1	61.000.000	Hikvision/BM smt II	-	-	-
145	Laptop/notebook/2018	2	46.077.800	Asus ROG-GL503GE/BM smt II	-	-	-
146	Server/2018	2	453.041.280	Dell EMC/BM smt II	-	-	-
147	Router node/2018	10	10.300.800	RB 951 Ui/BM smt II	-	-	-
148	Scanner/2019	1	13.173.000	Fujitsu SV600/BM smt I	-	-	-
149	Printer scanner/2019	1	2.850.000	Epson L3110/BM smt I	-	-	-
150	Laptop/2019	2	24.868.400	HP Pavilion X360/BM smt I	-	-	-
151	Personal Komputer/2019	1	11.925.000	HP AIO200G3/BM smt I	-	-	-
152	Papan nama instansi/2019	1	25.000.000	MC LED running teks/BM smt I	-	-	-
153	Laptop/2019	8	112.796.160	Asus FX505GD/Tuf Gaming/BM smt II	-	-	-
154	Hard disk/2019	1	3.850.560	Seagate back plus 8TB/BM smt II	-	-	-
155	Stabilisator kamera/2019	1	7.056.000	Zhiyun crane plus/BM smt II	-	-	-
156	CCTV indoor/2019	43	107.500.000	Hikvision DS-2CD2347 G43E/BM smt II	-	-	-
157	Tripod kamera/2019	1	700.000	Foto Pro S3-Black/BM smt II	-	-	-
158	Drone/2019	1	32.900.000	Mafic 2 Pro/BM smt II	-	-	-
159	Personal Komputer/2019	5	70.000.000	Asus S340MC/BM smt II	-	-	-
160	Personal Komputer/2019	2	48.000.000	Asus GL12CP/BM smt II	-	-	-
161	Laptop/2019	1	15.699.840	Acer swich i5-7200U (ts)/BM smt II	-	-	-
162	Router node/2019	12	24.000.000	RB450GX4/BM smt II	-	-	-
163	Access point/2019	15	29.736.000	Unifi APAC LR/BM smt II	-	-	-

No.	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Ket
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
164	Rak server/2019	2	23.101.440	CR42U/BM smt II	-	-	-
165	Hub/Desktop swich/2019	10	8.976.000	TL-SG1008P poe/BM smt II	-	-	-
166	Hub/Desktop swich/2019	15	4.464.000	TL-SG1008D/BM smt II	-	-	-
167	Televisi inchi/2019	43	1	5.870.100	LG/BM smt II	-	-
168	Televisi inchi/2019	43	1	6.334.800	LG/BM smt II	-	-
169	Firewall/2019	1	525.000.000	NGAF M550-F/BM smt II	-	-	-
170	Kursi putar/2019	12	39.192.000	Gresco GC810HA/BM smt II	-	-	-
171	Meja 1/2 biro/2019	4	5.292.000	Valmont ORI1275/BM smt II	-	-	-
172	Meja rapat/2019	6	13.746.000	Valmont ORI2412MT/BM smt II	-	-	-
173	Kursi putar/2019	8	6.960.000	Gresco GC605AR/BM smt II	-	-	-
174	Video wall display/Monitor/2019	12	766.620.000	DS-D2055NH/BM smt II	-	-	-
175	Kamera web/2019	1	18.000.600	Logitech Meetup 960-001101/BM smt II	-	-	-
176	Flat panel display (Panel presentasi)/2019	1	195.000.800	Viewsonic IF8650 86 inch/BM smt II	-	-	-
177	Video prosesor/Chasis part/2019	1	99.024.000	DS-C10S-S11/BM smt II	-	-	-
178	Video prosesor/Output Card/2019	3	107.836.500	DS-C10S-HO/BM smt II	-	-	-
179	Video prosesor/Input Card/2019	3	107.836.500	DS-C10S-HI/BM smt II	-	-	-
180	Stabilizer kamera/2019	1	25.021.000	DJI Ronin-MX3/BM smt II	-	-	-
181	Tripod kamera/2019	2	8.500.000	Manfrotto-3W/BM smt II	-	-	-
182	Tripod kamera/2019	2	8.428.000	Manfrotto-055-3S/BM smt II	-	-	-
183	Handytalkie/HT/2019	10	30.345.000	Motorolla/BM smt II	-	-	-
184	Repeater/2019	1	45.000.000	Motorolla/BM smt II	-	-	-
185	Powerspeaker/2019	1	33.531.500	JBL-EON 615/BM smt II	-	-	-
186	Wireless microphone/2019	2	20.400.000	Sennheiser EW122PG4/BM smt II	-	-	-
187	Dry Cabinet digital /Rak besi/2019	2	12.000.000	Samurai GP2-150L/BM smt II	-	-	-
188	Camcorder	2	104.400.000	Sony	-	-	-

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Ket
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
	(Kamera recorder)/2019			NXCAMHXR-NX5R/BM smt II			
189	Lensa kamera/2019	1	9.100.000	Sony SEL10-18mm ZA OSS/BM smt II	-	-	-
190	Lensa kamera/2019	1	13.000.000	Sony SEL16-70mm ZA OSS/BM smt II	-	-	-
191	Lensa kamera/2019	1	11.250.000	Sony SEL24mm Carl Zeis/BM smt II	-	-	-
192	Lensa kamera/2019	1	9.100.000	Sony SEL18-200mm OSS/BM smt II	-	-	-
193	Digital kamera/2019	2	85.600.000	Sony ILCE-7RM3/body only/BM smt II	-	-	-
194	Mobile trolley/2019	1	6.200.650	Viewsonic VB-STND-001/BM smt II	-	-	-
195	Harddisk 8 TB/2019	6	32.296.320	Western digital Purple/BM smt II	-	-	-
196	Harddisk 1.2TB/2019	6	34.200.000	Dell/BM smt II	-	-	-
197	Ram/memori 32GB/2019	2	32.400.000	Dell/BM smt II	-	-	-
198	UPS/9PX 11000VA/2019	1	61.375.000	Eaton/BM smt II	-	-	-
199	UPS 15000VA/2019	1	38.652.480	ICA FR1502C1/BM smt II	-	-	-
200	Meja rapat warroom/2019	1	29.882.000	WR-MAP/BM smt II	-	-	-
201	CCTV outdoor PTZ/2019	9	314.100.000	Hikvision DS-2DF8236I/BM smt II	-	-	-
202	CCTV outdoor/2019	24	463.200.000	Hikvision DS-2CD7A85G0/BM smt II	-	-	-
203	Antena Radio/2019	1	4.300.000	Hustler/BM smt II	-	-	-
204	AC unit/Window/2019	2	31.944.750	Sharp GS-A24SCY/BM smt II	-	-	-
205	Access point/2019	10	19.824.000	Unifi APAC LR/BM smt II	-	-	-
206	Hub/Desktop swicth/2019	5	4.488.000	TL-SG1008P poe/BM smt II	-	-	-
206	Tempat letak spanduk dinas/2019	1	2.500.000	NI-Adv/BM smt II	-	-	-
207	Router Server/2020	2	39.000.000	CCR1036-12G-4S-EMv2/BM smt II	-	-	-
208	Router Node/2020	4	9.000.000	RB450Gx4/BM smt II	-	-	-
209	PC Unit/2020	1	18.000.000	Lenovo AIO 540-241CB/all in one/BM smt II	-	-	-
210	Printer scanner/2020	2	7.000.000	Epson L3150/BM smt II	-	-	-

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Ket
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
211	PC Unit/2020	2	35.000.000	Ryzen7-3800X/Custom/B M smt II	-	-	-
212	Laptop/2020	2	50.000.000	Asus ROG StrikG17/NR03B1/BM smt II	-	-	-
213	Printer/2020	1	3.330.000	Epson L3150/BM smt II	-	-	-
214	Radio P2P/2020	2	3.589.000	Ubiquity Power Beam M5/BM smt II	-	-	-
215	Access Point/Wireless AP/2020	45	125.775.000	Unifi AP-AC Pro/BM smt II	-	-	-
216	Capture Card/2020	1	24.475.000	Atem mini pro ISO/Black Magic Design/BM smt II	-	-	-
217	Lighting set/2020	1	19.745.000	Godox S30-D/BM smt II	-	-	-
218	Lighting Mini Mirrorless/2020	1	962.500	Godox TT660 II Universal/BM smt II	-	-	-
219	Microphone Condenser/2020	2	29.700.000	TH-02TM-80 RR Pro/BM smt II	-	-	-
220	Microphone Webcam/2020	1	5.830.000	Logitech Expansion/BM smt II	-	-	-
221	Webcam/camera conference/2020	1	23.650.000	Logitech Group/BM smt II	-	-	-
222	Mobile Radio/HT/2020	1	14.080.000	Anysecu M-9900/BM smt II	-	-	-
223	Speaker Horn/2020	3	2.904.000	TOA ZH625S/BM smt II	-	-	-
224	Amplifier CCTV/2020	3	3.300.000	TOA ZA230W/BM smt II	-	-	-
225	Microphone/Wireless Mic.Clipon/2021	1	2.800.000	Wisdom WD-233/BM smt II	-	-	-
226	External/Harddisk portable 6 TB/2021	2	6.600.000	Western Digital/BM smt II	-	-	-
227	Tool Kit Set/Hand Tools Standar/2021	1	4.865.795	Krisbow LRTKM445/BM smt II	-	-	-
228	Laptop processor/2021	1	14.373.850	MSI GF63 11SC-080ID/BM smt II	-	-	-
229	Laptop processor/2021	2	23.550.000	Lenovo IP3 14IML05/BM smt II	-	-	-
230	Access Point/2021	8	18.000.000	Rujie/BM smt II	-	-	-
231	Hub 24p/Rackmount swicth/2021	2	3.600.000	TP-Link-TL-SG1024D/BM smt II	-	-	-
232	Router Node/2021	8	18.000.000	RB450GX4/BM smt II	-	-	-
233	Access Point/Wifi AP Controller/2021	1	12.500.000	Unifi Dream Machine Pro/BM smt II	-	-	-
234	AC Unit/Split 1.5 PK/2021	1	6.930.000	Panasonic/BM smt II	-	-	-

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Ket
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
235	Lemari Kayu/Document Cabinet/2021	1	11.980.000	Custom/BM smt II	-	-	-
236	External/Harddisk portable 6 TB/2022	2	6.000.000	Western Digital/BM smt I	-	-	-
237	External/Harddisk portable 6 TB/2022	1	3.800.000	Seagate/BM smt II	-	-	-
238	Kamera digital/2022	1	14.500.000	Sony A6400 CMOS/BM smt II	-	-	-
239	Lensa kamera/2022	1	8.700.000	Sigma F1.4DCDN 56mm/BM smt II	-	-	-
240	Mic. Wireless/2022	1	3.500.000	Saramonic Blink 500 ProB2/BM smt II	-	-	-
241	Teleprompter/2022	1	16.125.000	Desview T22/BM smt II	-	-	-
242	Secure dongle/flashdisk pengaman/2022	4	3.000.000	SDSP/BM smt II	-	-	-
243	Jammer Signal Portable/pengacak sinyal/2022	1	3.700.000	EUR-JC wifi 2.4/BM smt II	-	-	-
244	Router server/gateway/2023	1	24.650.000	Mikrotik CCR2116-12G-4S+/BM smt I	-	-	-
245	Tranceifer/pemancar penerima/2023	1	2.595.000	Ruiji XG-SFP-LR-SM1310 10G/BM smt I	-	-	-
246	Tranceifer single mode/2023	1	1.650.000	Ruiji XG-SFP-SR-SM80NM 10G/BM smt I	-	-	-
247	UPS/Backup Listrik/2023	1	60.360.360	APC Smart 6000VA SRT6KXLI/BM smt II	-	-	-
248	Stabilizer/Auto Voltage/2023	2	25.225.226	VGR SVC 15KVA/BM smt II	-	-	-
249	Kamera Digital/2024	2	20.800.000	Camera SonyAlpha A6600 (body Only)/2024			
250	Lensa Kamera/2024	2	40.000.000	Lensa Sony E 18 200MM F 3.5 6.3OSS LE/2024			
251	Kursi Rapat/2024	30	19.500.000	Kursi Chairman UC 406/2024			
252	Printer/2024	1	3.200.000	Printer Epson L3250			
253	Printer/2024	1	1.950.000	Printer Epson L121			
254	Lensa Kamera/2024	1	10.200.000	Lensa Kamera Sony 18-200mm, F3.56.3 OSS LE			
255	UPS/2024	1	987.000	UPS APC (700 VA/360 w)			
256	PC Unit/2024	2	59.740.000	PC ASUS ROG G13CHR - 7F1053500WSO Intel Core i7			

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Ket
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
				14700F/32GB/SS D/512GB/VGA Nvidia RTX3050 8GB/WINDOWS 11+OHS/Keyboard & Mouse Adobe Master Collection			
257	Laptop/2024	1	9.850.000	Laptop Asus Vivobook A1404ZA Intel Core i5-12345U/16GB/512GB/Intel Graphics/14" FHD IPS/Windows 11+OHS			
258	Laptop/2024	1	24.650.000	Laptop Asus TUF A25 FA507NUR-R745K6M-0 AMD Ryzen 7-7435HS/32GBSS D 512GB/Nvidia RTX4050 6GB/15.6 FHD 144Jz/Windows 11+OHS			
259	Notebook/2024	1	18.000.000	NB Lenovo IP Duet5 i7-13			
260	Filling Cabinet/2024	3	9.600.000	Lion Ekonomi L44 E			

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa asset yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika cukup banyak dan didominasi oleh asset yang berkaitan dengan infrastruktur Teknologi Informasi dan alat studio berkenaan dengan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Capaian kinerja pelayanan selama periode 2020-2024 secara umum menunjukkan perkembangan yang positif meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan kedepan. Adapun capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
	<b>Indikator Kinerja Utama (Sasaran)</b>																		
1	Indeks SPBE				2,65	2,09	2,25	2,09	3,00	3,01	2,09	2,81	2,93	3,82	114%	100%	125%	101%	127%
2	Persentase Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik				74%	92%	93%	100%	92%	80%	92%	100%	96,90%	92%	108%	100%	107%	96,90%	107%
3	Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi				30%	58%	83%	100%	58%	33%	58%	83%	100%	58%	110%	100%	100%	100%	100%
4	Nilai IKM Komunikasi dan Informatika (Renstra Perubahan)					85	86	87	85	72,03	85	85	87,54	85	-	100%	99%	100,62%	99%
5	Indeks domain pembangunan statistik				-	-	-	-	2,80	-	-	-	-	1,94	-	-	-	-	69,28%
	<b>Indikator Kinerja Program</b>																		
1	Program e Government																		
	indeks implementasi tata kelola SPBE				1,75	-	-	1,75	-	2,00	-	-	2,00	-	114%	-	-	114%	-
	indeks implementasi layanan SPBE				2,4	-	-	2,4	-	3,55	-	-	3,55	-	148%	-	-	148%	-
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika																		
	indeks implementasi tata kelola SPBE				-	1,70	2,00	2,15	1,70	-	1,8	2,2	2,40	1,8		106%	110%	112%	110%
	Indeks domain layanan SPBE				-	-	-	-	3,40	-	-	-	-	3,82					112%
	indeks implementasi layanan SPBE				-	2,60	2,70	3,55	2,60	-	2,7	3,37	3,26	2,7		104%	125%	91,8%	125%
3	Program Persandian dan Pengamanan Informasi																		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
	Persentase sistem elektronik/layanan SPBE yang telah menerapkan sertifikat elektronik/tanda tangan digital				57%	71%	86%	100%	71%	59%	87%	100%	100%	87%	104%	123%	116%	100%	116%
4	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik																		
	indeks kepuasan masyarakat terhadap kualitas informasi public				2,65	-	-	2,65	-	2,65	-	-	2,65	-	100%	-	-	100 %	-
5	Program Informasi dan Komunikasi Publik																		
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik				-	37,6	45	50%	37,6	-	52,7	42	57,43%	52,7	-	140%	93%	115 %	93%
6	Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral																		
	Persentase elemen data statistik sektoral yang tersedia				81%	-	-	81%	-	75%	-	-	75%	-	93%	-	-	93%	-
7	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral																		
	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah				-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-
	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun pelaporan pembangunan daerah Indeks domain pembangunan statistik				-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-
					-	-	-	-	2,80	-	-	-	-	1,94	-	-	-	-	69,28%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika 2025

**Tabel 2.6**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**

URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN WAJIB																	
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																	
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				8.956.870.789	8.956.870.789				8.649.692.500	8.649.629.500				96.57%			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA				3.787.485.789	4.562.535.583				3.700.398.368	4.405.984.883				97.70%	96.56%		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.025.943.239	3.703.106.583				2.978.769.930	3.568.305.179				98.44%	96.36%		
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan				3.025.943.239	3.703.106.583				2.978.769.930	3.568.305.179				98.44%	96.36%		
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	14.000.000				-	14.000.000				-	100%		
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				-	14.000.000				-	14.000.000				-	100%		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				309.747.350	289.038.300				306.206.798	287.591.257				99%	99.50%		

URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.141.000	8.136.500				8.073.000	7.766.000				99.17%	95.45%		
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor				21.103.900	33.999.700				21.041.000	33.164.500				99.71%	97.55%		
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan				15.023.450	4.001.800				12.574.850	3.940.200				83.70%	98.46%		
Sub Kegiatan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				265.479.000	242.900.000				264.479.000	242.720.557				99.62%	99.92%		
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				-	<b>42.365.000</b>				-	<b>34.250.000</b>				-	<b>80.84%</b>		
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-	42.365.000				-	34.250.000				-	80.84%		
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>306.318.400</b>	<b>307.092.000</b>				<b>286.957.540</b>	<b>296.189.260</b>				<b>93.67%</b>	<b>96.45%</b>		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				110.000.000	107.132.000				99.559.288	99.597.987				90.51%	92.69%		

URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				196.318.400	199.960.000				187.398.252	196.602.260				95.45%	98.32%		
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>145.476.800</b>	<b>206.934.000</b>				<b>128.464.100</b>	<b>205.638.200</b>				<b>88.30%</b>	<b>99.37%</b>		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				82.388.800	166.056.000				77.208.000	165.850.200				93.71%	99.88%		
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				4.780.000	26.908.000				2.422.100	26.658.000				50.67%	99%		
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya				31.868.000	13.970.000				31.734.000	3.130.000				99.58%	22.41%		
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				26.440.000	-				17.100.000	-				64.30%	-		

URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik				2.515.758.200	2.398.239.200				2.491.833.598	2.063.195.688				99.05%	86%		
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				2.515.758.200	2.398.239.200				2.491.833.598	2.063.195.688				99.05%	86%		
Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				268.804.500	-				254.945.877	-				94.85%	-		
Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				359.866.600	306.107.000				354.800.132	305.444.806				98.59%	99.79%		
Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik				-	159.129.000				-	156.261.382				-	98.20%		
Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media				1.883.087.100	1.491.017.200				1.878.543.839	1.485.526.500				99.83%	99.63%		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas				4.000.000	9.486.000				3.543.750	9.486.000				88.58%	100%		
Sub Kegiatan Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik				-	432.500.000				-	106.477.000				-	24.61%		
<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>				<b>2.653.626.800</b>	<b>1.846.011.000</b>				<b>2.457.460.534</b>	<b>1.826.694.501</b>				<b>92.60%</b>	<b>98.95%</b>		

URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2.653.626.800	1.846.011.000				2.457.460.534	1.826.694.501				92.60%	98.95%		
Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				-	110.641.000				-	110.129.041				-	99.53%		
Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik				298.076.800					267.355.002					89.69%	-		
Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				2.355.550.000	1.735.370.000				2.190.105.532	1.716.565.460				92.98%	98.91%		
<b>URUSAN STATISTIK</b>				<b>29.980.000</b>	<b>7.068.000</b>				<b>24.157.000</b>	<b>6.068.750</b>				<b>80.59%</b>	<b>86.14%</b>		
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>				<b>29.980.000</b>	<b>7.068.000</b>				<b>24.157.000</b>	<b>6.068.750</b>				<b>80.59%</b>	<b>86.14%</b>		
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral diLingkup Daerah Kabupaten /Kota				29.980.000	7.068.000				24.157.000	6.088.750				80.59%	86.14%		

URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				29.980.000	7.068.000				24.157.000	6.088.750				80.59%	86.14%		
<b>URUSAN PERSANDIAN</b>				<b>11.937.000</b>	<b>10.960.000</b>				<b>11.485.875</b>	<b>9.825.250</b>				<b>96.22%</b>	<b>89.65%</b>		
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>				<b>11.937.000</b>	<b>10.960.000</b>				<b>11.485.875</b>	<b>9.825.250</b>				<b>96.22%</b>	<b>89.65%</b>		
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				11.937.000	10.960.000				11.485.875	9.825.250				96.22%	89.65%		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota berbasis Elektronik dan Non Elektronik				11.937.000	10.960.000				11.485.875	9.825.250				96.22%	89.65%		

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Capaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika kota Padang Panjang dapat digambarkan sebagai berikut:

- Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan untuk program penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 3.787.485.789,- dengan realisasi Rp. 3.700.398.368,- atau dengan rasio 97.70%. kemudian pada tahun 2024 meningkat dengan pagu anggaran Rp. 4.562.535.583,- dan terealisasi Rp. 4.405.984.883,- atau dengan rasio 96.56%.
- Untuk program pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada tahun 2023 dengan anggaran Rp. 2.515.758.200,- dapat terealisasi Rp.2.398.239.200 atau dengan rasio 99.05%, Sementara pada tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp.2.398.239.200,- dapat terealisasi Rp.2.063.195.688,- atau dengan rasio 86% .
- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika pada tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp.2.653.626.800,- dapat terealisasi Rp.2.457.460.534,- atau dengan rasio 92.60%, kemudian pada tahun 2024 mengalami penurunan besaran dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.846.011.000,- dengan realisasi Rp.1.826.694.501,- atau dengan rasio 98.95%.
- Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial pada tahun 2023 memiliki anggaran sebesar Rp.29.980.000,- dengan realisasi Rp.7.068.000,- atau dengan rasio 80.59%, kemudian pada tahun 2024 pagu anggaran sebesar Rp.24.157.000,- dapat terealisasi Rp.6.068.750,- atau dengan rasio 86.14%.
- Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada tahun 2023 anggaran sebesar Rp. 11.937.000,- dengan realisasi 11.485.875,- atau dengan rasio 96.22%, kemudian pada tahun 2024 anggaran sebesar Rp.10.960.000,- dengan realisasi Rp.9.825.250,- atau dengan rasio 89.65%.

## 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Berikut adalah kelompok yang menjadi sasaran dalam pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.

**Tabel 2.7 Kelompok Sasaran Layanan**

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1	Aptika dan Persandian	Penyediaan Akses Internet	OPD
2	Informasi Komunikasi Publik dan Statistik	Penyediaan Informasi Publik melalui media	Masyarakat
		Penyediaan Data Statistik Sektoral	OPD, Instansi Vertikal dan Masyarakat
		Penyediaan dan Pengelolaan Kanal Layanan Aduan Masyarakat	Masyarakat

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Terdapat 2 (dua) Bidang yang berperan melaksanakan pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Pada bidang Aptika dan Persandian terdapat 1 jenis layanan yaitu Penyediaan Akses Internet dengan kelompok sasaran yakni OPD. Sementara itu pada Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik terdapat 3 jenis layanan yaitu Penyediaan Informasi Publik melalui media dengan kelompok sasaran yakni Masyarakat kemudian Penyediaan Data Statistik Sektoral dengan kelompok sasaran yaitu OPD, Instansi Vertikal dan Masyarakat dan terakhir Penyediaan dan Pengelolaan Kanal Layanan Aduan Masyarakat dengan kelompok Sasaran yakni Masyarakat.

### 2.1.5 Mitra Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pemberian pelayanan

Mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan meliputi komunitas lokal, dan pihak swasta yang bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik. Kolaborasi ini bertujuan untuk melengkapi kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun mitra Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pemberian pelayanan adalah:

**Tabel 2.8 Mitra Dinas Komunikasi dan Informatika**

No	Jenis Layanan	Mitra Kerja
(1)	(2)	(3)
1	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kemenkomdigi, Penyedia layanan internet ( Telkom, Iconnet)
2	Pengamanan Data dan Informasi	BSSN
3	Penyediaan Informasi Publik	Organisasi wartawan, media, Komisi Informasi
4	Penyediaan Data Statistik Sektoral	BPS
5	Penyediaan dan Pengelolaan Kanal Layanan Aduan Masyarakat	Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Padang Panjang

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025*

### 2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Padang Panjang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap kelancaran tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, terutama pada kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat. Dukungan BUMD ini dapat dilihat dalam beberapa aspek berikut:

#### 1. PDAM Tirta Serambi

- Memberikan dukungan dalam bentuk **penyediaan layanan air bersih** yang menjadi kebutuhan dasar operasional kantor.

- Berkontribusi terhadap **PAD** melalui laba usaha yang pada akhirnya memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pembiayaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika..

## **2. Bank Nagari (BUMD Perbankan Daerah)**

- Menyediakan layanan jasa keuangan dan perbankan yang mendukung pengelolaan administrasi keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika..
- Mendukung sistem pembayaran dan transaksi keuangan daerah, termasuk belanja operasional DPRD yang difasilitasi Sekretariat.
- Memberikan kontribusi terhadap PAD melalui dividen, sehingga mendukung alokasi anggaran pembangunan.

### **2.1.7 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika**

Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi berbagai aspek, mulai dari pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pengelolaan aplikasi dan informatika, penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan Pengamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah. Secara umum, Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas untuk memastikan kelancaran komunikasi dan informasi antar daerah, serta mempromosikan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pembangunan daerah.

Adapun kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika:

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik:
  - a. Melakukan kerjasama dalam rangka penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui kelompok organisasi masyarakat dan juga berbagai media.
2. Pengelolaan Aplikasi dan Informatika.
  - a. Mengembangkan dan mengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
  - b. Melakukan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM TI. komunikasi.

3. Penyelenggaraan satudata Indonesia
  - a. Melaksanakan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait lainnya untuk memastikan kualitas dan akurasi data statistik dalam rangka mewujudkan Satu Data Indonesia.
  - b. Menyediakan dokumen statistic sectoral sebagai bahan perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan pemerintah daerah.
- 2) Pengamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah.
  - a. Berkoordinasi dengan BSSN dalam rangka pengamanan data dan informasi pemerintah daerah.

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

### 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Walikota Padang Panjang 37 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang. maka Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang Statistik dan bidang persandian serta tugas pembantuan yang diberikan.

. Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsinya terkait urusan di bidang komunikasi dan informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.9 Pemetaan Permasalahan Pelayanan**

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya Penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital	Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Digital	1. Tidak tersedianya dokumen perencanaan strategis SPBE (Arsitektur dan Peta Rencana). 2. Masih terbatasnya

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			skalabilitas koordinasi internal
		Belum optimalnya pengelolaan layanan publik prioritas dan administrasi pemerintah berbasis digital	Masih adanya sistem informasi layanan publik dan administrasi pemerintah yang belum terintegrasi
		Penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur TI belum memadai	1. Terbatasnya ketersediaan infrastruktur dan pengelola Teknologi Informasi 2. Terjadinya gangguan keamanan informasi ( <i>cyber attack</i> )
		Masih rendahnya kompetensi Sumber Daya Manusia Digital	1. Terbatasnya upaya peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan, sosialisasi, dan workshop digitalisasi
2	Belum Optimalnya Keterbukaan Informasi Publik pemerintah daerah	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas informasi publik	1. Terbatasnya konten informasi yang berkualitas, inklusif dan partisipatif 2. Belum optimalnya pengelolaan media komunikasi publik pemerintah daerah

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			<p>melalui medsos, website, dan media luar ruang.</p> <p>3. Perlunya penguatan kerjasama dengan media dalam rangka publikasi informasi pembangunan</p>
		<p>Belum optimalnya pelayanan permohonan informasi publik</p>	<p>1. Terbatasnya ketersediaan Daftar Informasi Publik</p> <p>2. Belum optimalnya peran PPID pembantu (OPD) dalam mengelola informasi</p>
		<p>Belum optimalnya pengelolaan layanan pengaduan masyarakat</p>	<p>1. Belum tersedianya regulasi/tatakelola layanan pengaduan</p> <p>2. Masih minimnya sosialisasi dan informasi keberadaan kanal aduan</p> <p>3. Perlunya meningkatkan koordinasi lintas OPD untuk pengelolaan pengaduan yang responsif</p>

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
3	Terbatasnya ketersediaan dan pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Belum optimalnya tata Kelola statistik sektoral	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tersedianya kebijakan tentang penerapan Aspek Standar Data, Metadata, Interoperabilitas, dan Kode Referensi yang berlaku bagi seluruh Produsen Data</li> <li>2. Belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi penyelenggara statistik sektoral</li> <li>3. Terbatasnya Kompetensi SDM pengelola statistik</li> </ol>
4.	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Belum optimalnya capaian kinerja OPD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya pemahaman dan komitmen organisasi terkait dengan penjenjangan kinerja</li> <li>2. Belum tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang berkualitas.</li> <li>3. Terbatasnya skalabilitas</li> </ol>

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			<p>monitoring dan evaluasi kinerja.</p> <p>4. Hasil evaluasi kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar pengambilan keputusan.</p>

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

### 2.2.2 Isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dan berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika periode 2025-2029 lebih lanjut dijabarkan kedalam 3 urusan wajib yang dilaksanakan, sebagai berikut :

#### a. Urusan Komunikasi dan Informatika

##### 1) Informasi dan Komunikasi Publik yang Efektif dan Inklusif

Dinas Komunikasi dan Informatika berperan penting dalam melakukan penyebarluasan informasi pembangunan secara efektif dan inklusif. Efektif dan inklusif dalam hal ini adalah dengan menyajikan informasi secara cepat, akurat serta dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu diseminasi informasi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai kanal/saluran informasi untuk memastikan informasi tersebut diterima secara luas oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan. Beberapa kanal informasi yang digunakan antara lain :

- media digital/*online*, meliputi media social (*Facebook, whatsapp, Instagram, tiktok, youtube*), media luar ruang, (*videotron*), dan website pemerintah.
- Media tradisional meliputi sosialisasi, komunitas informasi masyarakat dan juga mobil informasi keliling.
- Kerjasama/relasi dengan media cetak maupun online

## 2) Perencanaan Strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Digital

Perencanaan strategis merupakan fondasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2024, salah satu kelemahan dalam pelaksanaan SPBE Kota Padang Panjang adalah masih belum tersedianya dokumen perencanaan strategis SPBE (Arsitektur dan Peta Rencana). Kondisi ini berimplikasi tidak optimalnya pelaksanaan SPBE karena tanpa panduan arahan yang jelas. Selain itu komitmen bersama pemangku kebijakan, dan koordinasi berkala juga sangat diperlukan guna merumuskan berbagai strategi dan kebijakan terkait penatalaksanaan SPBE terkait layanan publik maupun administrasi pemerintahan.

### b. Urusan Statistik

Data Statistik sektoral memegang peran fundamental dan krusial dalam pembangunan, karena Data statistik sektoral menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun rencana pembangunan yang tepat sasaran dan relevan dengan kondisi di lapangan sekaligus mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan program pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Sebagai Walidata Dinas Komunikasi dan Informatika memegang peranan yang sangat penting dalam menghasilkan data yang berkualitas dan terintegrasi dengan berkolaborasi dengan OPD sebagai walidata pendukung dalam Forum Satu Data.

### c. Urusan Persandian

Pengamanan informasi menjadi isu yang sangat penting ditengah transformasi digital layanan publik dan pemerintahan. Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya mengembangkan sistem keamanan informasi yang kuat untuk melindungi data penting, seperti data penduduk, data keuangan, dan data layanan publik. Hal ini penting untuk mencegah

kebocoran data, serangan siber, dan potensi penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan masyarakat. Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika juga berperan dalam peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan siber melalui program pendidikan, sosialisasi, dan pelatihan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Tabel 2.10 Pemetaan Isu Strategis Diskominfo

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			Global	Nasional	Regional	
<p>Urusan Komunikasi dan Informatika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2. Pemanfaatan TIK untuk Meningkatkan Kualitas Hidup</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital.</li> <li>2. Optimalisasi informasi dan komunikasi publik secara efektif dan inklusif</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Transformasi Digital Global;</b> Standar layanan digital yang semakin tinggi berdasarkan praktik baik internasional, dan Peningkatan ketergantungan pada infrastruktur digital untuk kegiatan ekonomi dan sosial</li> <li>2. <b>Keamanan Siber dan Privasi Data;</b> Peningkatan serangan siber lintas negara yang menasar infrastruktur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Implementasi SPBE:</b> Integrasi sistem informasi nasional dan daerah, Standardisasi infrastruktur dan platform digital pemerintahan</li> <li>2. <b>Infrastruktur Digital Nasional;</b> Pengembangan pusat data nasional dan komputasi awan pemerintah, Kesenjangan infrastruktur digital antara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Pengembangan Smart City/Smart Region;</b> Integrasi layanan publik berbasis digital, Pemanfaatan IoT untuk pengelolaan utilitas dan transportasi daerah, Kolaborasi antar daerah dalam pengembangan ekosistem digital</li> <li>2. <b>Kesenjangan Digital Intra-Regional;</b> Disparitas akses internet antara wilayah perkotaan dan pedesaan,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital</li> <li>2. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah</li> </ol>

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			Global	Nasional	Regional	
			<p>penting, Regulasi global terkait perlindungan data yang menjadi acuan standar internasional, Ketegangan geopolitik yang berimplikasi pada keamanan infrastruktur digital</p> <p>3. <b>Teknologi Disruptif</b> (AI dan machine learning)</p> <p>4. <b>Kesenjangan Digital Global</b>; Ketimpangan akses teknologi antara negara maju dan berkembang, Standar kompetensi digital global</p>	<p>Jawa dan luar Jawa</p> <p>3. <b>Transformasi Ekonomi Digital</b>; Pertumbuhan sektor e-commerce dan fintech yang membutuhkan dukungan kebijakan, Transformasi UMKM menuju digitalisasi</p> <p>4. <b>Kebijakan dan Regulasi</b>; Implementasi UU PDP (Perlindungan Data Pribadi), Revisi regulasi terkait konten digital dan media sosial, Penataan</p>	<p>Pemerataan infrastruktur digital di daerah terpencil, Peningkatan literasi digital masyarakat daerah</p> <p>3. <b>Tata Kelola Teknologi Informasi Daerah</b>; Implementasi interoperabilitas sistem informasi antar OPD, Manajemen sumber daya TIK yang masih terfragmentasi, Kapasitas dan kompetensi SDM digital di daerah yang belum memadai</p> <p>4. <b>Inovasi Pelayanan Publik Digital</b>;</p>	

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			Global	Nasional	Regional	
			yang terus meningkat	spektrum frekuensi untuk pengembangan 5G	Pengembangan aplikasi pelayanan terpadu berbasis digital, Otomatisasi proses administrasi pemerintahan, Penerapan analitik data untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti	
<p>Urusan Statistik:</p> <p>1. Penyediaan data statistik sektoral yang berkualitas dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan</p>	<p>Terbatasnya ketersediaan dan pemanfaatan data statistik yang berkualitas.</p>		<p><b>1. Big Data dan Analitik Lanjutan;</b> Pemanfaatan big data untuk melengkapi statistik resmi, Standar metodologi statistik berbasis big data, Kerangka kerja</p>	<p><b>1. Satu Data Indonesia;</b> Implementasi kebijakan Satu Data Indonesia, Standardisasi metadata dan interoperabilitas data nasional, Tata kelola data</p>	<p><b>1. Data Untuk Perencanaan Daerah;</b> Ketersediaan data yang kredibel untuk perencanaan daerah, Statistik sektoral untuk mendukung prioritas pembangunan</p>	<p>Penguatan Tata Kelola Statistik Sektoral dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia</p>

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			Global	Nasional	Regional	
			<p>internasional untuk integrasi multi-sumber data</p> <p><b>2. Open Data Movement;</b> Gerakan data terbuka global untuk transparansi dan akuntabilitas, Standar interoperabilitas data lintas negara, Etika penggunaan dan pertukaran data antar negara</p> <p><b>3. Sustainable Development Goals (SDGs) Monitoring;</b> Kebutuhan data presisi untuk pemantauan pencapaian SDGs, Harmonisasi</p>	<p>sebagai aset strategis nasional</p> <p><b>2. Transformasi Sensus dan Survei;</b> Modernisasi metode sensus dan survei dengan pemanfaatan teknologi; Integrasi data administratif dengan data statistik, Efisiensi sumber daya dalam pengumpulan data skala besar</p> <p><b>3. Kapasitas Statistik Nasional;</b> Peningkatan kompetensi SDM statistik,</p>	<p>daerah, Sinkronisasi data untuk perencanaan pusat dan daerah</p> <p><b>2. Kapasitas Statistik Daerah;</b> Keterbatasan SDM statistik di daerah, Infrastruktur pengelolaan data daerah yang belum memadai, Peningkatan kompetensi statistik di OPD non-statistik</p> <p><b>3. Koordinasi Data Antar OPD;</b> Duplikasi pengumpulan data antar perangkat daerah, Inkonsistensi data dari berbagai sumber di</p>	

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			Global	Nasional	Regional	
			<p>indikator statistik internasional, Peningkatan kapasitas statistik untuk monitoring SDGs</p> <p><b>4. Data Privacy dan Ethics;</b> Keseimbangan antara keterbukaan data dan perlindungan privasi, Standar etika dalam pengumpulan dan pengolahan data, Anonimisasi dan pseudonimisasi data sensitif</p>	<p>Harmonisasi statistik sektoral dan statistik dasar</p> <p><b>4. Diseminasi Data dan Statistik Publik;</b> Strategi komunikasi data dan literasi statistik masyarakat, Visualisasi data untuk pengambilan kebijakan, Portal data terpadu nasional</p>	<p>daerah, Mekanisme clearing house data daerah</p> <p><b>4. Statistik Spesifik Daerah;</b> Kebutuhan data untuk pengembangan potensi ekonomi lokal, Statistik kearifan lokal dan budaya daerah, Pengembangan indikator khusus sesuai karakteristik daerah</p>	

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			Global	Nasional	Regional	
Urusan Persandian: 1. Pengamanan Layanan Administrasi dan Layanan Publik Digital. 2. Pendidikan dan Sosialisasi Keamanan Siber	Belum optimalnya pengamanan informasi pemerintah daerah		<b>1. Ancaman Siber Transnasional;</b> Peningkatan serangan siber terorganisir lintas negara, Cyber espionage dan perang siber sebagai ancaman keamanan negara, Standar internasional keamanan siber (ISO 27001, NIST Framework) <b>2. Teknologi Kriptografi Quantum;</b> Perkembangan quantum computing yang mengancam sistem kriptografi konvensional, Pengembangan post-quantum	<b>1. Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional;</b> Roadmap keamanan siber nasional, Pengembangan kapasitas Computer Security Incident Response Team (CSIRT) nasional, Koordinasi antar lembaga dalam penanganan insiden siber <b>2. Regulasi Keamanan Siber dan Persandian;</b> Implementasi UU Keamanan dan	<b>1. Implementasi Persandian Daerah;</b> Pengembangan CSIRT daerah, Penerapan persandian dalam komunikasi antar OPD, Manajemen risiko keamanan informasi tingkat daerah <b>2. Keamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah;</b> Pengamanan database kependudukan dan aset informasi vital daerah, Enkripsi komunikasi elektronik pemerintah daerah, Keamanan aplikasi	Pengamanan Sistem dan Jaringan Informasi Pemerintah Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			Global	Nasional	Regional	
			cryptography, Standar kriptografi tahan serangan quantum <b>3. Kerangka Kerja Sama Keamanan Siber Internasional:</b> Konvensi keamanan siber internasional, Pertukaran informasi ancaman siber antar negara, Harmonisasi regulasi keamanan siber global <b>4. Teknologi Zero Trust Architecture;</b> Pergeseran paradigma keamanan dari perimeter-based	Ketahanan Siber, Standar teknis persandian nasional, Sertifikasi produk dan SDM persandian <b>3. Infrastruktur Kunci Publik Nasional;</b> Pengembangan dan pengelolaan sertifikat elektronik nasional, Tanda tangan digital untuk dokumen pemerintahan, Interoperabilitas sistem PKI (Public Key Infrastructure) <b>4. Perlindungan Infrastruktur</b>	pelayanan publik daerah <b>3. Kapasitas SDM Persandian Daerah;</b> Keterbatasan jumlah dan kompetensi personel persandian, Sertifikasi dan pelatihan SDM persandian daerah, Kesenjangan kapasitas persandian antar daerah <b>4. Koordinasi Persandian Pusat-Daerah;</b> Integrasi sistem monitoring keamanan siber nasional dan daerah, Standardisasi infrastruktur	

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			Global	Nasional	Regional	
			ke zero-trust, Implementasi multi-factor authentication skala global, Kerangka manajemen identitas dan akses terintegrasi	<b>Informasi Kritisal Nasional;</b> Identifikasi dan proteksi sektor infrastruktur kritisal, Monitoring dan respons insiden pada infrastruktur vital, Pengembangan sistem deteksi dini ancaman siber nasional	persandian daerah, Mekanisme eskalasi dan penanganan insiden siber daerah	

Isu-isu lingkungan dinamis sebagaimana tertuang pada tabel di atas secara langsung mempengaruhi kinerja dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang. Perumusan strategi dalam Renstra perlu mempertimbangkan isu-isu ini untuk memastikan relevansi dan antisipasi terhadap perkembangan lingkungan strategis.

Berdasarkan tabel pemetaan diatas dirumuskanlah Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang menjadi tantangan untuk diselesaikan pada periode Renstra 2025-2029 terutama dalam mengatasi permasalahan pokok yang dirumuskan sebelumnya sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital
2. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah
3. Meningkatkan Tata Kelola Statistik Sektoral dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia
4. Pengamanan Sistem dan Jaringan Informasi Pemerintah Daerah
5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029**

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang yaitu **“PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARWAH.** dengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika termasuk dalam Misi ke-3 yakni ***“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif”***.

.Visi dan misi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Walikota Padang Panjang dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Satuan	Baseline (2024)	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital		Nilai Indeks SPBE/Pemdi	Angka	3.16	3.16	1.89	1.99	2.10	2.21	2.32
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP DIInas Komunikasi dan Informatika	Angka	70.90	71	73.03	75.07	77.1	79.14	81.17
		Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik pemerintah daerah	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka	80.90	81	82	83	84	85	86
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital	Indeks Domain Layanan SPBE	Angka	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82
			Nilai Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	Angka	na	na	1.72	1.83	1.94	2.05	2.16
		Terwujudnya Layanan Statistik Akurat dan Dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik	Angka	1.94	1.94	2.8	2.8	3	3	3.6

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas, akuntabel, serta mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang selaras dengan sasaran RPJMD 2025–2029.

Dinas Komunikasi dan informatika berperan dalam mendukung pelaksanaan Misi ke-3 yakni **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif”**, dengan sasaran **Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif**. Sasaran ini sekaligus menjadi tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika selama periode Renstra 2025-2029. Untuk mengukur pencapaian sasaran ini menggunakan indikator indeks SPBE/Pemerintahan Digital.

Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital dengan menggunakan indikator kinerja indeks SPBE/Pemdi.
2. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik pemerintah daerah dengan menggunakan indikator kinerja hasil penilaian keterbukaan informasi public.
3. Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data statistik yang berkualitas dengan menggunakan indikator kinerja indeks pembangunan statistik.
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator kinerja nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah.

**Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Peningkatan tata kelola pemerintahan digital <i>(arsitektur, Peta Rencana SPBE, skalabilitas koordinasi internal)</i>	Peningkatan tata kelola pemerintahan digital <i>(skalabilitas koordinasi internal)</i>	Peningkatan tata kelola pemerintahan digital <i>(skalabilitas koordinasi internal)</i>	Peningkatan tata kelola pemerintahan digital <i>(skalabilitas koordinasi internal)</i>	Peningkatan tata kelola pemerintahan digital <i>(skalabilitas koordinasi internal)</i>
Peningkatan layanan publik prioritas dan administrasi pemerintah berbasis digital	Peningkatan layanan publik prioritas dan administrasi pemerintah berbasis digital	Peningkatan layanan publik prioritas dan administrasi pemerintah berbasis digital	Peningkatan layanan publik prioritas dan administrasi pemerintah berbasis digital	Peningkatan layanan publik prioritas dan administrasi pemerintah berbasis digital
Penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur TI secara optimal <i>((Jaringan internet, server, router n perangkat pendukung lainnya, keamanan informasi pemerintah))</i>	Penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur TI secara optimal <i>((Jaringan internet, server, router n perangkat pendukung lainnya, keamanan informasi pemerintah))</i>	Penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur TI secara optimal <i>((Jaringan internet, server, router n perangkat pendukung lainnya, keamanan informasi pemerintah))</i>	Penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur TI secara optimal <i>((Jaringan internet, server, router n perangkat pendukung lainnya, keamanan informasi pemerintah))</i>	Penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur TI secara optimal <i>((Jaringan internet, server, router n perangkat pendukung lainnya, keamanan informasi pemerintah))</i>
Meningkatkan kompetensi dan budaya Sumber Daya Manusia digital	Meningkatkan kompetensi dan budaya Sumber Daya Manusia digital	Meningkatkan kompetensi dan budaya Sumber Daya Manusia digital	Meningkatkan kompetensi dan budaya Sumber Daya Manusia digital	Meningkatkan kompetensi dan budaya Sumber Daya Manusia digital
Meningkatkan kualitas dan kuantitas daftar informasi publik	Meningkatkan kualitas dan kuantitas daftar informasi publik	Meningkatkan kualitas dan kuantitas daftar informasi publik	Meningkatkan kualitas dan kuantitas daftar informasi publik	Meningkatkan kualitas dan kuantitas daftar informasi publik
Optimalisasi Pelayanan permohonan informasi publik	Optimalisasi Pelayanan permohonan informasi publik	Optimalisasi Pelayanan permohonan informasi publik	Optimalisasi Pelayanan permohonan informasi publik	Optimalisasi Pelayanan permohonan informasi publik
Meningkatkan pengelolaan layanan aduan masyarakat	Meningkatkan pengelolaan layanan aduan masyarakat	Meningkatkan pengelolaan layanan aduan masyarakat	Meningkatkan pengelolaan layanan aduan masyarakat	Meningkatkan pengelolaan layanan aduan masyarakat

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika 2025

### 3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi adalah pemilihan angka spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Arah Kebijakan**

VISI: "PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARWAH"			
MISI .. : "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif".			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital	Peningkatan tata kelola pemerintahan digital	1. Menyusun Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 2. Meningkatkan skalabilitas koordinasi internal
		Peningkatan layanan publik prioritas dan administrasi pemerintah berbasis digital	Mengembangkan sistem informasi layanan publik dan administrasi pemerintah yang terintegrasi
		Penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur TI secara optimal	1. Menyediakan dan mengelola infrastruktur TI (( <i>Jaringan internet, server, router infrastruktur keamanan informasi pemerintah dan perlengkapan pendukung lainnya</i> ) 2. Meningkatkan keamanan informasi pemerintah daerah
		Meningkatkan kompetensi dan budaya Sumber Daya Manusia digital	Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, workshop digitalisasi

VISI: "PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARWAH"			
MISI .. : "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif".			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas dan kuantitas daftar informasi publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan konten informasi yang berkualitas, inklusif dan partisipatif</li> <li>2. Mengelola media komunikasi publik pemerintah daerah melalui medsos, website, media luar ruang</li> <li>3. Melaksanakan kerjasama dengan media dalam rangka informasi dan publikasi pembangunan</li> </ol>
		Optimalisasi Pelayanan permohonan informasi publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.meningkatkan ketersediaan Daftar Informasi Publik</li> <li>2. meningkatkan peran PPID pembantu (OPD)</li> </ol>
		Meningkatkan pengelolaan layanan aduan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyediakan regulasi/tatakelola layanan aduan</li> <li>2.melaksanakan sosialisasi dalam rangka promosi kanal aduan lapor melalui media sosial dan media luar ruang</li> <li>3.meningkatkan koordinasi untuk pengelolaan pengaduan yang responsif</li> </ol>
	Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Penguatan tata kelola statistik sektoral terkait dengan kualitas, proses bisnis dan kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun kebijakan tentang penerapan Aspek Standar Data, Metadata, Interoperabilitas, dan Kode Referensi yang berlaku bagi seluruh Produsen Data</li> <li>2. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi penyelenggara statistik sektoral</li> <li>3. meningkatkan Kompetensi SDM Bidang Statistik dan SDM Bidang Manajemen Data</li> </ol>
		Optimalisasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan satu data indonesia</li> </ol>
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.	penguatan tata kelola SAKIP Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun perencanaan kinerja yang selaras dan terukur</li> <li>2. melaksanakan pengukuran kinerja yang berjenjang dan berkelanjutan</li> <li>3. Menyusun lapoan kinerja yang akuntabel</li> <li>4. pelaksanaan evaluasi internal secara berkala untuk perbaikan berkelanjutan</li> </ol>

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN**  
**BIDANG URUSAN**

**4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika**

Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program. Sementara, subkegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari kegiatan. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran.

Sebagai penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Padang Panjang dan mengacu pada program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025 – 2029, perumusan program dan kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>KET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
S3.1 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika			
				Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah secara tepat waktu	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah paket instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME	SUB KEGIATAN	OUTPUT	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							disediakan	
						Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	
						Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	
						Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	
						Pengadaan Peralatan mesin	Jumlah Unit Peralatan Mesin yang Disediakan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME	SUB KEGIATAN	OUTPUT	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Unit Peralatan yang Disediakan	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME	SUB KEGIATAN	OUTPUT	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
		2.Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital	Indeks SPBE/Pemdi	<b>Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika</b>	Indeks Domain Tata Kelola SPBE			
					Nilai Aspek Strategi dan Rencana			
					Nilai Aspek Tata Kelola dan Manajemen			
					Nilai Aspek Teknologi Digital			
					Nilai Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah			
				Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten kota	Persentase capaian pelaksanaan kegiatan pengelolaan e-government	koordinasi pemanfaatan pusat data nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME	SUB KEGIATAN	OUTPUT	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							Pusat Data Nasional	
						penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah kab/kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
						koordinasi pemanfaatan portal pelayanan pemerintah daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME	SUB KEGIATAN	OUTPUT	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana spbe pemerintah daerah serta pemanfaatan aplikasi umum spbe	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	
						Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	
						Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME	SUB KEGIATAN	OUTPUT	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola spbe meliputi arsitektur peta rencana proses bisnis serta penyusunan rencana dan anggaran spbe pemerintah daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
						koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten atau kota cerdas  pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas  jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital	
				<b>Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</b>	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME	SUB KEGIATAN	OUTPUT	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
		3.Meningkatkan keterbukaan informasi publik pemerintah daerah	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	<b>Program Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik</b>  Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei) Persentase capaian kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	
						Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME	SUB KEGIATAN	OUTPUT	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							sesuai peraturan perundangan	
						Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	
						Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	
						penyusunan konten	Jumlah Konten Informasi Publik	
						penguatan kapasitas sumber daya manusia komunikasi publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME	SUB KEGIATAN	OUTPUT	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							bimtek/pelatihan	
		4.Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Indeks Pembangunan Statistik	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	Indeks Pembangunan Statistik Domain Prinsip SDI			
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap sistim statistik nasional	Persentase Perangkat daerah yang menggunakan data statistik untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan dan/atau penyusunan kebijakan	
						pemenuhan prinsip satu data indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME	SUB KEGIATAN	OUTPUT	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							induk	
						Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	
						peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	
						koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

**Tabel 4.2**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika**

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODE REKENING	BIDANG URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								7,505,913,153		6,084,899,843		5,210,043,427		6,707,696,956		6,525,910,303		6,588,567,598		38,623,031,280
T.KOMINFO-1 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital				Indeks Pemerintahan Digital	Angka	NA	NA		1.89		1.99		2.10		2.21		2.32		2.32	
				Indeks SPBE	Angka	3.16	3.16		3.16		3.16		3.16		3.16		3.16		3.16	
	S.KOMINFO-1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Nilai AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	angka	70.90	71		73.03		75.07		77.1		79.14		81.17		81.17	
	2.16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					7,496,558,153		6,064,899,843		5,185,043,427		6,037,696,956		5,870,910,303		5,918,567,598	0	36,573,676,280
	2.16.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					4,910,043,753		4,547,545,400		3,346,507,400		3,876,160,929		3,662,374,276		3,680,031,571		24,689,244,529
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika	%	100	100	4,910,043,753	100	4,547,545,400	100	3,346,507,400	100	3,876,160,929	100	3,662,374,276	100	3,680,031,571	100	24,689,244,529
	2.16.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									6,000,000		6,000,000		6,000,000		6,000,000		24,000,000
			Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	0	0		0		100	6,000,000	100	6,000,000	100	6,000,000	100	6,000,000	100	24,000,000
	2.16.01.2.01.007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	0		0		1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	4	24,000,000
	2.16.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3,423,153,761		3,425,080,000		2,145,542,000		2,102,195,529		2,108,408,876		2,126,066,171		15,330,446,337
			Terselenggaranya layanan administrasi keuangan perangkat daerah.	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	100	3,423,153,761	100	3,425,080,000	100	2,145,542,000	100	2,102,195,529	100	2,108,408,876	100	2,126,066,171	100	15,330,446,337
	2.16.01.2.02.001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	352	352	3,423,153,761	378	3,394,000,000	378	2,114,462,000	378	2,071,115,529	378	2,077,328,876	378	2,094,986,171	2282	15,175,046,337
	2.16.01.2.02.003		Palaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	na	-		12	31,080,000	12	31,080,000	12	31,080,000	12	31,080,000	12	31,080,000	60	155,400,000
	2.16.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									4,000,000		7,000,000		7,000,000		7,000,000		25,000,000
			Terselenggaranya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah.	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%						100	4,000,000	100	7,000,000	100	7,000,000	100	7,000,000	100	25,000,000
	2.16.01.2.05.002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	0	-				27	4,000,000	27	7,000,000	27	7,000,000	27	7,000,000	108	25,000,000
	2.16.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					120,169,575		97,500,000		98,000,000		98,000,000		98,000,000		98,000,000		609,669,575
			Terselenggaranya layanan administrasi umum perangkat daerah.	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	%	100	100	120,169,575	100	97,500,000	100	98,000,000	100	98,000,000	100	98,000,000	100	98,000,000	100	609,669,575
	2.16.01.2.06.001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4,750,440	4	2,500,000	4	3,000,000	4	3,000,000	4	3,000,000	4	3,000,000	24	19,250,440
	2.16.01.2.06.004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	15,888,510	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	24	65,888,510

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODE REKENING	BIDANG URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDIS I AWAL (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
		2.16.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	5,138,725	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	72	30,138,725		
		2.16.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	24	94,391,900	24	80,000,000	24	80,000,000	24	80,000,000	24	80,000,000	24	80,000,000	144	494,391,900		
		2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					6,289,900		7,000,000		55,000,000		625,000,000		405,000,000		405,000,000		1,503,289,900		
			Tersedianya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang sesuai dengan rencana kebutuhan.	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	%	100	100	6,289,900	100	7,000,000	100	55,000,000	100	625,000,000	100	405,000,000	100	405,000,000	100	1,503,289,900		
		2.16.01.2.07.001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	-	0	-	1	30,000,000	1	250,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	4	340,000,000		
		2.16.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	-	2	7,000,000	3	25,000,000	7	350,000,000	7	350,000,000	7	350,000,000	26	1,082,000,000		
		2.16.01.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		2	6,289,900	0	-	0	-	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	8	81,289,900		
		2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,273,849,317	-	917,965,400		917,965,400		917,965,400		917,965,400		917,965,400		5,863,676,317		
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan untuk mendukung pelayanan perkantoran.	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	%	100	100	1,273,849,317	100	917,965,400	100	917,965,400		917,965,400	100	917,965,400	100	917,965,400	100	5,863,676,317		
		2.16.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	36	103,600,269	36	100,000,000	36	100,000,000	36	100,000,000	36	100,000,000	36	100,000,000	216	603,600,269		
		2.16.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	1,170,249,048	12	817,965,400	12	817,965,400	12	817,965,400	12	817,965,400	12	817,965,400	72	5,260,076,048		
		2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					86,581,200	-	100,000,000		120,000,000		120,000,000		120,000,000		120,000,000		666,581,200		
			Tersedianya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang kondusif baik	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah kondusif baik	%	100	100	86,581,200	100	100,000,000	100	120,000,000	100	120,000,000	100	120,000,000	100	120,000,000	100	666,581,200		
		2.16.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	7	73,127,200	1	50,000,000	1	50,000,000	1	30,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	303,127,200		
		2.16.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	0	-	5	30,000,000	5	30,000,000	5	50,000,000	5	30,000,000	5	30,000,000	5	170,000,000		
		2.16.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	54	0	-	54	10,000,000	54	10,000,000	54	10,000,000	54	10,000,000	54	10,000,000	54	50,000,000		
		2.16.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	13,454,000	1	10,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	103,454,000		
		2.16.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	-	0	-	10	10,000,000	10	10,000,000	10	10,000,000	10	10,000,000	2	40,000,000		
		2.16.01.2.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	30	54	24,270,000	0	-	30	10,000,000	30	10,000,000	30	10,000,000	30	10,000,000	30	64,270,000		
	S.KOMINFO-2. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik pemerintah daerah			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka	80.9	81		82		83		84		85		86		86	-		

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODE REKENING	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
		2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					1,202,717,400		962,234,600		1,000,515,500		1,510,515,500		1,510,515,500		1,510,515,500		7,697,014,000
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	%	NA	77	1,202,717,400	78	962,234,600	79	1,000,515,500	80	1,510,515,500	81	1,510,515,500	82	1,510,515,500	82	7,697,014,000
		2.16.02.2.01	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah					1,202,717,400		962,234,600		1,000,515,500		1,510,515,500		1,510,515,500		1,510,515,500		7,697,014,000
			Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase capaian pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	%	NA	100	1,202,717,400	100	962,234,600	100	1,000,515,500	100	1,510,515,500	100	1,510,515,500	100	1,510,515,500	100	7,697,014,000
		2.16.02.2.01.014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi diwajah pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Laporan	60	60	1,127,515,500	60	887,515,500	60	887,515,500	60	887,515,500	60	887,515,500	60	887,515,500	360	5,565,093,000
		2.16.02.2.01.015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
		2.16.02.2.01.017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	NA	12	3,552,000	12	6,552,000	12	7,000,000	12	7,000,000	12	7,000,000	12	7,000,000	72	38,104,000
		2.16.02.2.01.019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	1	0	-	200	progul : sapras	200	3,000,000	200	3,000,000	200	3,000,000	200	3,000,000	1000	12,000,000
		2.16.02.2.01.021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/uknis	Media	4	4	71,649,900	4	68,167,100	4	100,000,000	4	610,000,000	4	610,000,000	4	610,000,000	24	2,069,817,000
		2.16.02.2.01.023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	0	0	-	700	-	700	3,000,000	700	3,000,000	700	3,000,000	700	3,000,000	3500	12,000,000
		<b>S.KOMINFO-3. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital</b>		<b>Nilai aspek keterpaduan layanan digital pemerintah</b>	<b>Angka</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>		<b>1.72</b>		<b>1.83</b>		<b>1.94</b>		<b>2.05</b>		<b>2.16</b>		<b>2.16</b>	
				<b>Indeks Domain Layanan SPBE</b>	<b>Angka</b>	<b>3.82</b>	<b>3.82</b>		<b>3.82</b>		<b>3.82</b>		<b>3.82</b>		<b>3.82</b>		<b>3.82</b>		<b>3.82</b>	
		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Angka	2.90	2.90	1,359,527,000		555,119,843	2.90	828,020,527	2.90	641,020,527	2.90	688,020,527	2.90	718,020,527	2.90	4,789,728,951
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Nilai aspek strategi dan rencana	Angka	NA	NA		1.22		1.33		1.44		1.55		1.66		1.66	
				Nilai aspek tata kelola	Angka	NA	NA		1.91		2.02		2.13		2.24		2.35		2.35	
				Nilai aspek teknologi digital	Angka	NA	NA		3.22		3.33		3.44		3.55		3.66		3.66	
		2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					1,359,527,000	-	555,119,843		828,020,527		641,020,527		688,020,527		718,020,527		4,789,728,951
			Terlaksananya kegiatan pengelolaan e-government	Persentase capaian pelaksanaan kegiatan pengelolaan e-government	persen	NA	100	1,359,527,000	100	555,119,843	100	828,020,527	100	641,020,527	100	688,020,527	100	718,020,527	100	4,789,728,951
		2.16.03.2.02.030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	23	23	1,344,842,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	23	1,344,842,000

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODE REKENING	BIDANG URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDIS I AWAL (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
		2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Aplikasi	NA	0	-	0	-	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	8	40,000,000
		2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	NA	1	14,685,000	0	-	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	9	54,685,000
		2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	0	0	1	475,119,843	1	788,020,527	1	601,020,527	1	648,020,527	1	678,020,527	1	3,190,201,951	
		2.16.03.2.02.0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Dokumen	NA	0	2	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	50,000,000	
		2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitas penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Dokumen	NA	0	1	30,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	5	110,000,000	
		2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					3,850,000	10,000,000		10,000,000	640,000,000	640,000,000	640,000,000	640,000,000	640,000,000	0	1,943,850,000		
		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					3,850,000	10,000,000		10,000,000	640,000,000	640,000,000	640,000,000	640,000,000	640,000,000	0	1,943,850,000		
			<i>Meningkatnya keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah</i>	<i>Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi</i>	<i>nilai</i>	78	82	3,850,000	10,000,000	91	10,000,000	95	640,000,000	98	640,000,000	100	640,000,000	100	1,943,850,000	
		2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					3,850,000	10,000,000		10,000,000	640,000,000	640,000,000	640,000,000	640,000,000	640,000,000		1,943,850,000		
			<i>Terlaksananya penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase capaian pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah</i>	<i>persen</i>	NA	100%	3,850,000	10,000,000	100%	10,000,000	100%	640,000,000	100%	640,000,000	100%	640,000,000	100%	1,943,850,000	
		2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	1	3,850,000	0	10,000,000	0	3,000,000	1	634,000,000	1	634,000,000	1	634,000,000	4	1,918,850,000
		2.21.02.2.01.0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Laporan	0	0	-	0	-	30	4,000,000	30	6,000,000	30	6,000,000	30	6,000,000	120	22,000,000
		2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	Dokumen	0	0	-	0	-	1	3,000,000	0	-	0	-	0	-	1	3,000,000
		S.KOMINFO-4 Terwujudnya Layanan Statistik			Indeks Pembangunan Statistik	indeks	1.94	1.94		2.80	2.80		3	3		3.60	3.60		-	
		2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					5,505,000	10,000,000		15,000,000	30,000,000	15,000,000	30,000,000	15,000,000	30,000,000	0	105,505,000		
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					5,505,000	10,000,000		15,000,000	30,000,000	15,000,000	30,000,000	15,000,000	30,000,000	0	105,505,000		
			<i>Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)</i>	<i>Nilai domain prinsip SDI</i>	<i>Angka</i>	1.50	1.50	5,505,000	10,000,000	2.70	15,000,000	3.10	30,000,000	3.30	15,000,000	3.60	30,000,000	3.60	105,505,000	

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODE REKENING	BIDANG URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDIS I AWAL (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
				Nilai domain kualitas	Angka	1.87	1.87		2.70		2.91		3.01		3.31		3.50		3.50			
				Nilai domain proses bisnis	Angka	2.17	2.17		2.92		3.12		3.32		3.40		3.60		3.60			
		2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				5,505,000		10,000,000		15,000,000		30,000,000		15,000,000		30,000,000		105,505,000			
			Terlaksananya penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	Persentase capaian penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	Persen	NA	100	5,505,000	100	10,000,000	100	15,000,000	100	30,000,000	100	15,000,000	100	30,000,000	100	105,505,000		
		2.20.02.2.01.0 008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	%	0%	100	5,505,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	100	5,505,000		
		2.20.02.2.01.0 018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	%	0%	0	-	50	3,000,000	60	5,000,000	65	5,000,000	70	2,000,000	75	5,000,000	75	20,000,000		
		2.20.02.2.01.0 019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	%	na	0	-	90	-	90	3,000,000	90	10,000,000	90	3,000,000	90	10,000,000	90	26,000,000		
		2.20.02.2.01.0 020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	na	0	-	30	7,000,000	30	4,000,000	30	10,000,000	30	7,000,000	30	10,000,000	150	38,000,000		
		2.20.02.2.01.0 022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	Laporan	na	0	-	0	-	1	3,000,000	1	5,000,000	1	3,000,000	1	5,000,000	4	16,000,000		

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Tabel 4.3

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas  
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	<p>Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Subkegiatan Relasi Media</p> <p>Subkegiatan Pelayanan Informasi Publik.</p> <p>Subkegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik.</p> <p>Subkegiatan Penyusunan Konten</p> <p>Subkegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik</p>	
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	<p>Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Subkegiatan koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana spbe pemerintah daerah serta pemanfaatan aplikasi umum spbe</p> <p>Subkegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan</p> <p>Subkegiatan Penyediaan Akses Internet</p> <p>Subkegiatan koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola spbe meliputi arsitektur peta rencana proses bisnis serta penyusunan rencana dan anggaran spbe pemerintah daerah</p> <p>Subkegiatan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten atau kota cerdas</p>	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
			Subkegiatan pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital	
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap sistim statisti nasional	
			Subkegiatan pemenuhan prinsip satu data indonesia	
			Subkegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
			Subkegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	
			Subkegiatan Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan Statistik SEktoral	
4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
			Subkegiatan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	
			Subkegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Tabel 4.4

Daftar Subkegiatan Unggulan dalam mendukung Program Unggulan  
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan Pelayanan Informasi Publik. Subkegiatan Penyusunan Konten	Mendukung Program Unggulan Padang Panjang Barcode
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana spbe pemerintah daerah serta pemanfaatan aplikasi umum spbe Subkegiatan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten atau kota cerdas Subkegiatan pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital	

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap sistim statisti nasional	
			Subkegiatan pemenuhan prinsip satu data indonesia	
			Subkegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
			Subkegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	
			Subkegiatan Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

## 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator dilakukan dengan mengidentifikasi kinerja sesuai dengan lingkup bidang pelayanan dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini sekaligus sebagai evaluasi dalam meningkatkan kinerja guna mencapai tujuan, sasaran, sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Renstra. Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.5**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika**

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai Indeks SPBE/Pemdi	nilai	3.16	1.89	1.99	2.1	2.21	2.32	
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	nilai	81	82	83	84	85	86	
3	Indeks Pembangunan Statistik	nilai	1.94	2.8	2.8	3	3	3.6	
4	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	nilai	71,00	73.03	75.07	77.1	79.14	81.17	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. IKK Dinas Komunikasi dan Informatika diukur berdasarkan 3 (tiga) urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangannya, seperti terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.6**  
**Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika**

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase	80	81	82	83	84	85
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui peta kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase	100	100	100	100	100	100
4	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100
5	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan	Persentase	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	daerah							
6	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	Nilai	82	87	91	95	98	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Padang Panjang berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis(Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kota Padang Panjang.

Padang Panjang, September 2025  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Padang Panjang



**DRS AMPERA, SH.MSi**

NIP.196801011998031010

**LAMPIRAN I**  
**POHON KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**Tahun 2025-2029**

## POHON KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG

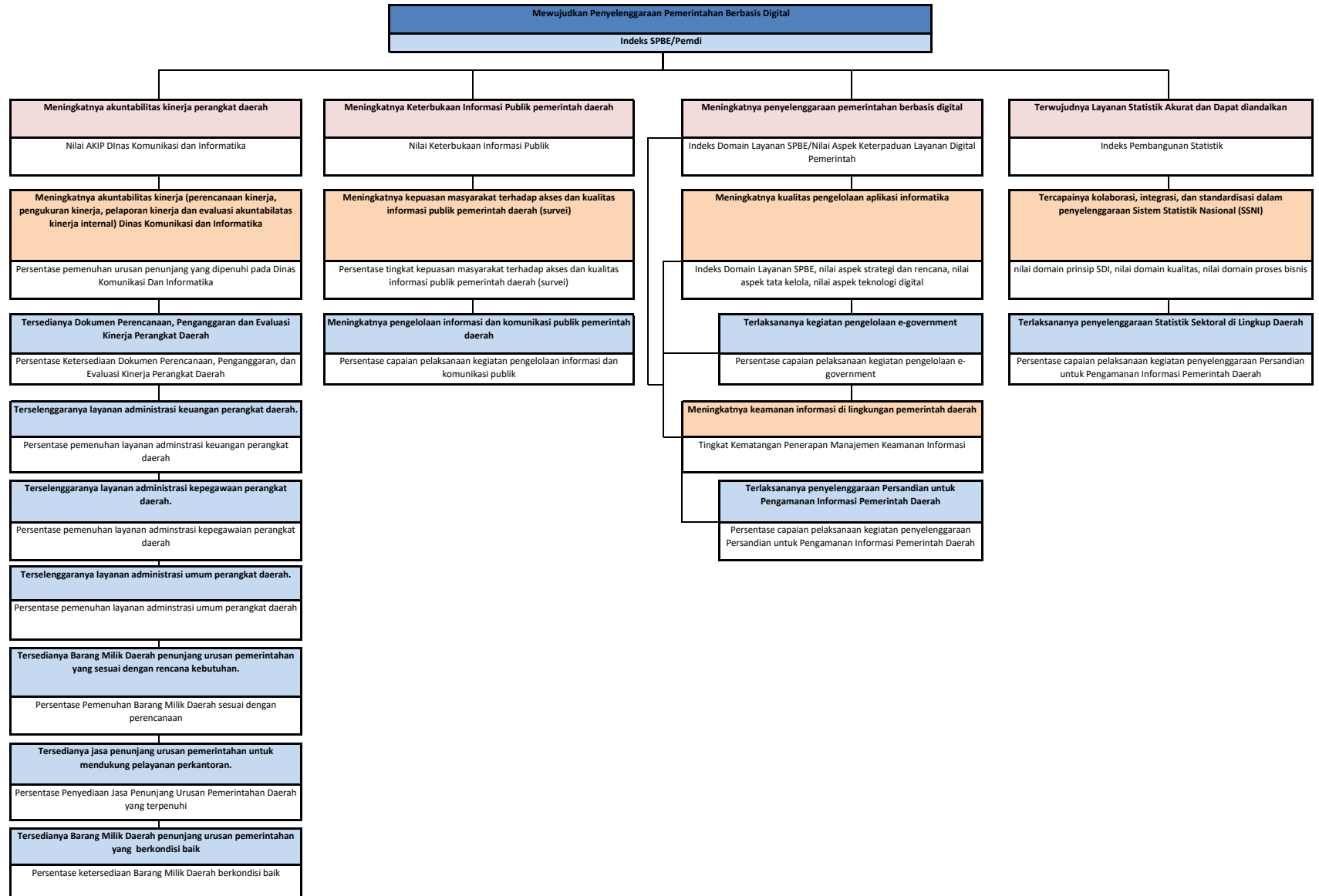
Berdasarkan Renstra Dinas Kominfo Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

Tujuan OPD/Ulimate Outcome

Sasaran Strategis/Intermediate Outcome

Immediate Outcome

Output



**LAMPIRAN II**  
**CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**Tahun 2025-2029**

## CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG

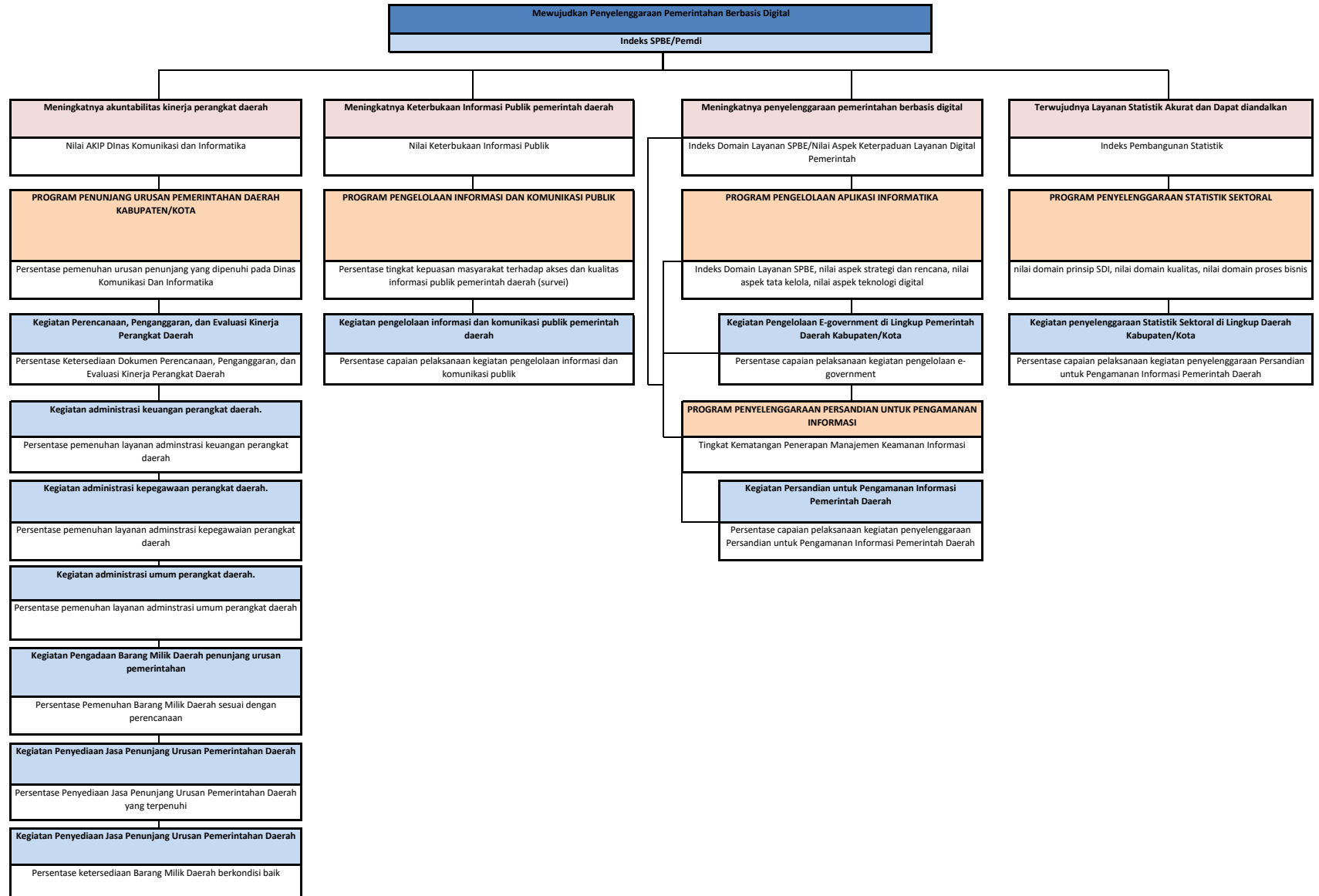
Berdasarkan Renstra Dinas Kominfo Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

Tujuan OPD

Sasaran Strategis/Kinerja Eselon II

Program/Kinerja Eselon III

Kegiatan/Kinerja Eselon IV



## LAMPIRAN III

### METADATA METADATA INDIKATOR KINERJA (IKU, IKK, INDIKATOR PROGRAM)

#### A. METADATA INDIKATOR KINERJA URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

##### 1. Nilai Indeks SPBE/Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)

Nama Indikator	Nilai Indeks SPBE dan Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)
<b>Definisi</b>	<b>Nilai Indeks SPBE dan Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)</b> adalah nilai keseluruhan dari penerapan SPBE/ Pemerintahan Digital pada suatu instansi atau entitas.  Indeks Pemdi menjadi akan menjadi acuan dalam menilai kinerja transformasi digital pemerintahan, menggantikan indeks SPBE mulai tahun 2026 dengan target peningkatan bertahap hingga tahun 2029.
<b>Rumus Perhitungan</b>	<b>Indeks SPBE/Pemdi = <math>\Sigma</math> (NDj x BDj).</b>  Rumus ini merupakan penjumlahan dari perkalian nilai Indeks Domain (NDj) dengan Bobot Domain (BDj) untuk setiap domain SPBE/ Pemdi.  Keterangan :  <b>NDj (Nilai Indeks Domain):</b> Merupakan nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi tingkat kematangan SPBE/ Pemerintah Digital pada setiap domain. Domain SPBE/ Pemdi sendiri meliputi Tata Kelola Pemdi, Teknologi Pemdi, Budaya dan Kompetensi Digital ASN, Transformasi digital layanan publik prioritas serta ketersediaan dan pemanfaatan data, yang masing-masing memiliki aspek penilaian.

	<p><b>BDj (Bobot Domain):</b></p> <p>Merupakan nilai yang diberikan pada setiap domain sebagai indikator pentingnya domain tersebut dalam penerapan SPBE secara keseluruhan. Bobot ini dapat berbeda-beda tergantung pada kebijakan atau pedoman yang berlaku.</p> <p><i>Pada Indeks SPBE</i> terdapat 4 domain yang menjadi penilaian meliputi kebijakan, tatakelola, manajemen dan layanan</p> <p><i>Pada Indeks Pemdi</i> terdapat 9 domain yang menjadi area penilaian, meliputi : Strategi dan Rencana, Tata Kelola dan Manajemen, Teknologi Digital, Audit Teknologi Digital, Keamanan Siber, Kapabilitas dan Budaya Digital, Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi, Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah dan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah</p>
<b>Interpretasi</b>	<p>Nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan semakin baik penerapan SPBE dalam suatu instansi atau daerah, dan mengindikasikan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Perbandingan nilai indeks dari waktu ke waktu atau antar unit pemerintahan dapat memberikan wawasan tentang kemajuan dan disparitas.</p> <p>Hasil perhitungan akhir akan dikonversi ke dalam skala 1.0 – 5.0 dengan kategori sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>4.2 – 5.0:</b> Memuaskan</li> <li>• <b>3.5 – &lt; 4.2:</b> Sangat Baik</li> <li>• <b>2.6 – &lt; 3.5:</b> Baik</li> <li>• <b>1.8 – &lt; 2.6:</b> Cukup</li> <li>• <b>&lt; 1.8:</b> Kurang</li> </ul>
<b>Sumber Data</b>	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
<b>Frekuensi</b>	Dua Tahunan

## 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah

Nama Indikator	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah
<b>Definisi</b>	<p>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah adalah hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah terhadap 4 (Empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan Kinerja;</li> <li>b. Pengukuran Kinerja;</li> <li>c. Pelaporan Kinerja;</li> <li>d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</li> </ul>
<b>Rumus Perhitungan</b>	<p><b>= <math>\Sigma</math> (Nilai Komponen AKIP x Bobot Komponen AKIP).</b></p> <p>Rumus ini merupakan penjumlahan dari perkalian nilai seluruh komponen AKIP (NKA) dengan Bobot Komponen AKIP</p>
<b>Interpretasi</b>	<p>Nilai AKIP OPD mencerminkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kinerja masing-masing dinas. Semakin tinggi nilainya, semakin baik OPD tersebut dalam menjalankan tugas secara efisien dan berorientasi pada hasil yang berdampak ke masyarakat. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori peringkat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan.</p>
<b>Sumber Data</b>	Inspektorat
<b>Frekuensi</b>	Tahunan

## 3. Indeks Domain Layanan SPBE

Nama Indikator	Indeks Domain Layanan SPBE
<b>Definisi</b>	<p><b>Indeks Domain Layanan SPBE</b> adalah nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi tingkat kematangan SPBE pada domain Layanan SPBE yang meliputi layanan administrasi dan layanan publik</p>
<b>Rumus</b>	Indeks Domain Layanan SPBE =

<b>Perhitungan</b>	$\Sigma$ (Nilai Aspek 1 + Nilai Aspek 2 + Nilai Aspek 3) Rumus ini merupakan penjumlahan dari nilai masing masing aspek yang menjadi komponen pada domain layanan SPBE .
<b>Interpretasi</b>	Nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan semakin baik penerapan SPBE dalam suatu instansi atau daerah, dan mengindikasikan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Perbandingan nilai indeks dari waktu ke waktu atau antar unit pemerintahan dapat memberikan wawasan tentang kemajuan dan disparitas.  Hasil perhitungan akhir akan dikonversi ke dalam skala 1.0 – 5.0 dengan kategori sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>4.2 – 5.0:</b> Memuaskan</li> <li>• <b>3.5 – &lt; 4.2:</b> Sangat Baik</li> <li>• <b>2.6 – &lt; 3.5:</b> Baik</li> <li>• <b>1.8 – &lt; 2.6:</b> Cukup</li> <li>• <b>&lt; 1.8:</b> Kurang</li> </ul>
<b>Sumber Data</b>	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
<b>Frekuensi</b>	Dua Tahunan

#### 4. Nilai aspek keterpaduan layanan digital pemerintah

<b>Nama Indikator</b>	<b>Nilai aspek keterpaduan layanan digital pemerintah</b>
<b>Definisi</b>	adalah nilai yang menggambarkan kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah untuk memanfaatkan sistem penghubung layanan, keterpaduan layanan administrasi pemerintahan, pemanfaatan portal administrasi pemerintahan, keterpaduan pelayanan public digital, pemanfaatan portal nasional pelayanan publik dan pemanfaatan identitas digital nasional.
<b>Rumus Perhitungan</b>	= $\Sigma$ Nilai Tingkat Kematangan Rumus ini merupakan penjumlahan dari nilai masing masing

	tingkat kematangan yang menjadi komponen pada domain keterpaduan layanan digital pemerintah indeks Pemdi . Indikator ini memiliki bobot 15% dari keseluruhan indeks Pemdi
<b>Interpretasi</b>	Nilai yang lebih tinggi menunjukkan semakin baik penerapan transformasi digital pemerintah
<b>Sumber Data</b>	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
<b>Frekuensi</b>	Dua Tahunan

## 5. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

<b>Nama Indikator</b>	<b>Nilai Keterbukaan Informasi Publik</b>
<b>Definisi</b>	<b>Nilai Keterbukaan Informasi Publik</b> adalah ukuran untuk menilai sejauh mana badan publik telah memenuhi kewajibannya dalam menyediakan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari ketersediaan informasi di situs web, kemudahan akses informasi, hingga responsivitas badan publik terhadap permintaan informasi.
<b>Rumus Perhitungan</b>	<p>Nilai Hasil Keterbukaan Informasi Publik = 80% hasil kuesioner pemeringkatan badan publik + 20% hasil presentasi badan publik.</p> <p>Keterangan :</p> <p>Hasil kuesioner pemeringkatan badan publik = <math>\Sigma</math> Nilai Indikator.</p> <p>Rumus ini merupakan penjumlahan dari nilai setiap indikator.</p> <p>Indikator mengumumkan informasi publik, total nilai 25.</p> <p>Indikator menyediakan dokumen informasi publik, total nilai 10.</p> <p>Indikator pengembangan website, total nilai 25.</p> <p>Indikator kelembagaan, total nilai 15.</p> <p>Indikator Pengadaan Barang dan Jasa, total nilai 25.</p> <p>Hasil presentasi badan publik:</p> <p>Merupakan nilai presentasi yang dilaksanakan dengan cara</p>

	mengundang Badan Publik yang lolos passing grade dengan point 60 berdasarkan hasil verifikasi kuesioner dalam situs <a href="http://monev.komisiinformasi.go.id">monev.komisiinformasi.go.id</a> . mempresentasikan terhadap materi yang ditentukan oleh Komisi Informasi Pusat.
<b>Interpretasi</b>	<p>Nilai hasil monev yang lebih tinggi menunjukkan semakin baik penerapan keterbukaan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbandingan nilai hasil monev dari waktu ke waktu atau antar unit pemerintahan dapat memberikan wawasan tentang kemajuan dan disparitas.</p> <p>Berdasarkan nilai akhir yang diperoleh, Badan Publik diklasifikasikan ke dalam lima kategori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Informatif:</b> Nilai 90 – 100</li> <li>• <b>Menuju Informatif:</b> Nilai 80 – 89,9</li> <li>• <b>Cukup Informatif:</b> Nilai 60 – 79,9</li> <li>• <b>Kurang Informatif:</b> Nilai 40 – 59,9</li> <li>• <b>Tidak Informatif:</b> Nilai &lt; 39,9</li> </ul>
<b>Sumber Data</b>	Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat
<b>Frekuensi</b>	Tahunan

#### 6. Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Komunikasi dan Informatika

<b>Nama Indikator</b>	<b>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi</b>
<b>Definisi</b>	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada OPD adalah ukuran seberapa banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhasil memenuhi standar pelaksanaan urusan penunjang sesuai tugas dan fungsi mereka (Urusan rutin OPD)
<b>Rumus</b>	$= \frac{\Sigma \text{Capaian pelaksanaan kegiatan terkait urusan penunjang}}{\Sigma \text{kegiatan terkait urusan penunjang}} \times 100\%$
<b>Interpretasi</b>	Semakin tinggi persentasenya, semakin efektif dan efisien OPD dalam menjalankan fungsi pendukung pemerintahan

<b>Sumber Data</b>	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>Frekuensi</b>	Tahunan

## 7. Indeks Domain Tata Kelola SPBE

<b>Nama Indikator</b>	<b>Indeks Domain Tata Kelola SPBE</b>
<b>Definisi</b>	<b>Indeks Domain Tata Kelola SPBE</b> adalah nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi tingkat kematangan SPBE pada domain Tata Kelola SPBE yang meliputi aspek perencanaan strategis, teknologi informasi dan komunikasi dan penyelenggaraan SPBE
<b>Rumus Perhitungan</b>	Indeks Domain Tata Kelola SPBE = $\Sigma$ (Nilai Aspek 1 + Nilai Aspek 2 + Nilai Aspek 3) Rumus ini merupakan penjumlahan dari nilai masing masing aspek yang menjadi komponen pada domain tata Kelola yang meliputi aspek perencanaan strategis, teknologi informasi dan komunikasi dan penyelenggaraan SPBE .
<b>Interpretasi</b>	<p>Nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan semakin baik penerapan SPBE dalam suatu instansi atau daerah, dan mengindikasikan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Perbandingan nilai indeks dari waktu ke waktu atau antar unit pemerintahan dapat memberikan wawasan tentang kemajuan dan disparitas.</p> <p>Hasil perhitungan akhir akan dikonversi ke dalam skala 1.0 – 5.0 dengan kategori sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>4.2 – 5.0:</b> Memuaskan</li> <li>• <b>3.5 – &lt; 4.2:</b> Sangat Baik</li> <li>• <b>2.6 – &lt; 3.5:</b> Baik</li> <li>• <b>1.8 – &lt; 2.6:</b> Cukup</li> <li>• <b>&lt; 1.8:</b> Kurang</li> </ul>

<b>Sumber Data</b>	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
<b>Frekuensi</b>	Dua Tahunan

### 8. Nilai aspek strategi dan rencana

<b>Nama Indikator</b>	<b>Nilai aspek strategi dan rencana</b>
<b>Definisi</b>	Nilai aspek strategi dan rencana adalah nilai yang menggambarkan 5 (lima) tingkat kematangan pemerintah digital meliputi strategi transformasi digital pemerintah, inovasi proses bisnis tematik, arsitektur pemerintah digital, peta rencana pemerintah digital, keterpaduan rencana dan anggaran pemerintah digital.
<b>Rumus Perhitungan</b>	= $\Sigma$ Nilai Tingkat Kematangan Rumus ini merupakan penjumlahan dari nilai masing masing tingkat kematangan yang menjadi komponen pada domain aspek strategi dan rencana indeks Pemdi . Indikator ini memiliki bobot 5% dari keseluruhan indeks Pemdi
<b>Interpretasi</b>	Nilai yang lebih tinggi menunjukkan semakin baik penerapan transformasi digital pemerintah
<b>Sumber Data</b>	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
<b>Frekuensi</b>	Dua Tahunan

### 9. Nilai aspek tata Kelola dan manajemen

<b>Nama Indikator</b>	<b>Nilai Aspek Tata Kelola dan Manajemen</b>
<b>Definisi</b>	Nilai aspek tata Kelola dan manajemen adalah nilai yang menggambarkan 4 (empat) tingkat kematangan pemerintah digital meliputi skalabilitas koordinasi internal instansi, kolaborasi penerapan pemerintahan digital, penerapan manajemen resiko dan keberlangsungan dan penerapan manajemen layanan.
<b>Rumus</b>	= $\Sigma$ Nilai Tingkat Kematangan

<b>Perhitungan</b>	Rumus ini merupakan penjumlahan dari nilai masing masing tingkat kematangan yang menjadi komponen pada domain aspek tata Kelola dan manajemen indeks Pemdi .  Indikator ini memiliki bobot 5% dari keseluruhan indeks Pemdi
<b>Interpretasi</b>	Nilai yang lebih tinggi menunjukkan semakin baik penerapan transformasi digital pemerintah
<b>Sumber Data</b>	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
<b>Frekuensi</b>	Dua Tahunan

#### 10. Nilai aspek teknologi digital

<b>Nama Indikator</b>	<b>Nilai Aspek Teknologi Digital</b>
<b>Definisi</b>	Nilai aspek teknologi digital adalah nilai yang menggambarkan 4 (empat) tingkat kematangan pemerintah digital meliputi pembangunan/pengembangan aplikasi, pemanfaatan ekosistem pusat data nasional, layanan jaringan intra pemerintah, dan pemanfaatan teknologi baru.
<b>Rumus Perhitungan</b>	= $\Sigma$ Nilai Tingkat Kematangan Rumus ini merupakan penjumlahan dari nilai masing masing tingkat kematangan yang menjadi komponen pada domain aspek teknologi digital indeks Pemdi . Indikator ini memiliki bobot 5% dari keseluruhan indeks Pemdi
<b>Interpretasi</b>	Nilai yang lebih tinggi menunjukkan semakin baik penerapan transformasi digital pemerintah
<b>Sumber Data</b>	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
<b>Frekuensi</b>	Dua Tahunan

#### 11. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Public Pemerintah Daerah (Survey)

<b>Nama Indikator</b>	<b>Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Public Pemerintah Daerah (Survey)</b>
<b>Definisi</b>	<b>Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei)</b> adalah ukuran yang menggambarkan proporsi masyarakat yang menyatakan puas terhadap kemudahan dalam memperoleh (akses) dan mutu (kualitas) informasi publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Indeks ini diperoleh melalui survei terhadap masyarakat umum atau kelompok masyarakat tertentu di wilayah Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Tingkat kepuasan diukur berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan berbagai aspek akses dan kualitas informasi publik.
<b>Rumus Perhitungan</b>	$\text{Persentase Kepuasan} = \left( \frac{\text{Jumlah Responden yang Menyatakan Puas}}{\text{Jumlah Total Responden}} \right) \times 100$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Jumlah Responden yang Menyatakan Puas = responden yang memberikan jawaban dengan kategori "<i>Puas</i>" atau "<i>Sangat Puas</i>" (tergantung skala yang digunakan).</li> <li>□ Jumlah Total Responden = total orang yang mengisi survei.</li> </ul>
<b>Interpretasi</b>	Semakin tinggi nilai indeks, semakin besar proporsi masyarakat yang puas terhadap akses dan kualitas informasi publik Pemerintah Daerah. Nilai 100% menunjukkan kepuasan penuh seluruh responden.
<b>Sumber Data</b>	Data Primer dari Survei
<b>Frekuensi</b>	Tahunan

**12. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo**

<b>Nama Indikator</b>	<b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo</b>
<b>Definisi</b>	Mengukur persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo.
<b>Rumus Perhitungan</b>	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$
<b>Interpretasi</b>	Semakin tinggi nilai persentase, semakin banyak OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan kominfo untuk layanan public dan pemerintahan
<b>Sumber Data</b>	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>Frekuensi</b>	Tahunan

**13. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi**

<b>Nama Indikator</b>	<b>Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</b>
<b>Definisi</b>	Mengukur persentase layanan public yang diselenggarakan secara <i>online</i> dan terintegrasi.
<b>Rumus Perhitungan</b>	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$ <p>▪ <b>Pembilang</b></p>

	<p>jumlah Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi sehingga menjadi satu kesatuan alur kerja yang mudah untuk diakses, yang ada di pemerintah daerah Kabupaten/Kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Penyebut</b> jumlah keseluruhan Layanan Publik secara <i>online</i> di Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang sudah maupun belum terintegrasi</li> </ul>
<b>Interpretasi</b>	Semakin tinggi nilai, semakin banyak layanan public terintegarasi yang diselenggarakan.
<b>Sumber Data</b>	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>Frekuensi</b>	Tahunan

**14. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota**

<b>Nama Indikator</b>	<b>persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota</b>
<b>Definisi</b>	Mengukur persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota
<b>Rumus Perhitungan</b>	<p><i>Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya</i></p> <p><i>Jumlah Penduduk</i></p> <p style="text-align: right;"><i>x 100%</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Pembilang</b> Jumlah keseluruhan masyarakat berusia 15-64 tahun yang mendapatkan atau mengetahui informasi publik</li> </ul>

	<p>berupa kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah, program prioritas pemerintah maupun pemerintah daerah Kabupaten/Kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Penyebut</b> Jumlah penduduk berusia 15-64 tahun yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang sudah maupun belum mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</li> </ul>
<b>Interpretasi</b>	Semakin tinggi nilai, semakin banyak jumlah masyarakat yang terpapar informasi public berupa kebijakan dan program prioritas pemerintah.
<b>Sumber Data</b>	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>Frekuensi</b>	Tahunan

## B. METADATA INDIKATOR KINERJA URUSAN STATISTIK

### 1. Indeks Pembangunan Statistik

<b>Nama Indikator</b>	<b>Indeks Pembangunan Statistik (IPS)</b>
<b>Definisi</b>	<b>Indeks Pembangunan Statistik (IPS)</b> adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan dan kapasitas statistik suatu institusi (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah), baik dari sisi kelembagaan, sumber daya, infrastruktur, proses statistik, maupun kualitas dan keterbukaan data. IPS bertujuan untuk memetakan kesiapan dan kematangan statistik sektoral serta mendorong perbaikan tata kelola statistik nasional.
<b>Rumus Perhitungan</b>	$IPS = \frac{\sum (Skor\ Subkomponen \times Bobot\ Subkomponen)}{\sum Bobot}$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ IPS = Indeks Pembangunan Statistik (nilai akhir dalam skala 0–100)</li> <li>□ <math>S_i</math> = Skor komponen ke-i (nilai antara 0–100 berdasarkan penilaian masing-masing aspek statistik)</li> <li>□ <math>B_i</math> = Bobot komponen ke-i (persentase kontribusi dari tiap</li> </ul>

	komponen terhadap total indeks) <input type="checkbox"/> $\sum (S_i \times B_i)$ = Jumlah dari semua hasil perkalian skor dengan bobot per komponen <input type="checkbox"/> $\sum B_i$ = Total bobot seluruh komponen (biasanya 100)
<b>Interpretasi</b>	Interpretasi ini mendukung Monitoring kemajuan implementasi Sistem Statistik Nasional (SSN). Perencanaan penguatan statistik sektoral dan tematik. Pemingkatan institusi berbasis kualitas statistik
<b>Sumber Data</b>	Dokumen pembentukan UPS, regulasi internal, SK pejabat statistik
<b>Frekuensi</b>	Tahunan

## 2. Nilai domain prinsip SDI

<b>Nama Indikator</b>	<b>Nilai Domain Prinsip SDI</b>
<b>Definisi</b>	Hasil penilaian terhadap tingkat kematangan penerapan standar fundamental dalam pengelolaan data pemerintah, meliputi aspek Standar Data Statistik, Metadata Statistik, Interoperabilitas Data, dan Kode Referensi/Data Induk, untuk memastikan data mudah ditemukan, dimengerti, diakses, dan dibagipakaikan secara terintegrasi di seluruh instansi, dengan bobot penilaian sebesar 28% dalam Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
<b>Rumus Perhitungan</b>	$IPS = \frac{\sum (Skor\ Subkomponen \times\ Bobot\ Subkomponen)}{\sum Bobot}$
<b>Interpretasi</b>	Interpretasi ini mendukung Monitoring kemajuan implementasi Sistem Statistik Nasional (SSN). Perencanaan penguatan statistik sektoral dan tematik. Pemingkatan institusi berbasis kualitas statistik
<b>Sumber Data</b>	Dokumen pembentukan UPS, regulasi internal, SK pejabat statistik
<b>Frekuensi</b>	Tahunan

## 3. Nilai domain Kualitas Data

<b>Nama Indikator</b>	<b>Nilai Domain Prinsip SDI</b>
<b>Definisi</b>	Hasil penilaian terhadap tingkat kematangan aspek kualitas data, relevansi, akurasi, aktualitas dan ketepatan waktu, aksesibilitas, keterbandingan dan konsistensi Data Statistik Sektoral Instansi Pemerintah, dengan bobot penilaian

	sebesar 24% dalam Indeks Pembangunan Statistik (IPS).
<b>Rumus Perhitungan</b>	$IPS = \frac{\sum (Skor\ Subkomponen \times Bobot\ Subkomponen)}{\sum Bobot}$
<b>Interpretasi</b>	Interpretasi ini mendukung Monitoring kemajuan implementasi Sistem Statistik Nasional (SSN). Perencanaan penguatan statistik sektoral dan tematik. Pemeringkatan institusi berbasis kualitas statistik
<b>Sumber Data</b>	Dokumen pembentukan UPS, regulasi internal, SK pejabat statistik
<b>Frekuensi</b>	Tahunan

#### 4. Nilai domain proses bisnis

<b>Nama Indikator</b>	<b>Nilai Domain Prinsip SDI</b>
<b>Definisi</b>	Hasil penilaian terhadap tingkat kematangan aspek perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data dan penyebarluasan data Statistik Sektoral Instansi Pemerintah, dengan bobot penilaian sebesar 19% dalam Indeks Pembangunan Statistik (IPS).
<b>Rumus Perhitungan</b>	$IPS = \frac{\sum (Skor\ Subkomponen \times Bobot\ Subkomponen)}{\sum Bobot}$
<b>Interpretasi</b>	Interpretasi ini mendukung Monitoring kemajuan implementasi Sistem Statistik Nasional (SSN). Perencanaan penguatan statistik sektoral dan tematik. Pemeringkatan institusi berbasis kualitas statistik
<b>Sumber Data</b>	Dokumen pembentukan UPS, regulasi internal, SK pejabat statistik

#### 5. Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

<b>Nama Indikator</b>	<b>Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah</b>
<b>Definisi</b>	Nilai yang menggambarkan persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

<b>Rumus Perhitungan</b>	<p>Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah x 100%</p> $= \frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Pembilang</b> Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah berupa angka yang dapat menunjukkan fluktuasi terhadap perubahan meningkat atau menurun dari data yang diperoleh atau disajikan pada tahun yang diperoleh.</li> <li>▪ <b>Penyebut</b> : Jumlah keseluruhan perangkat daerah.</li> </ul>
<b>Interpretasi</b>	Semakin tinggi nilai persentase, semakin banyak OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
<b>Sumber Data</b>	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>Frekuensi</b>	Tahunan

#### 6. Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah

<b>Nama Indikator</b>	<b>Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah</b>
<b>Definisi</b>	Nilai yang menggambarkan persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah
<b>Rumus Perhitungan</b>	<p>Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah x 100%</p> $= \frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Pembilang</b> Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah berupa angka yang dapat menunjukkan fluktuasi terhadap perubahan meningkat</li> </ul>

	<p>atau menurun dari data yang diperoleh atau disajikan pada tahun yang diperoleh.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Penyebut</b> : Jumlah keseluruhan perangkat daerah.</li> </ul>
<b>Interpretasi</b>	Semakin tinggi nilai persentase, semakin banyak OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah.
<b>Sumber Data</b>	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>Frekuensi</b>	Tahunan

### C. METADATA INDIKATOR KINERJA URUSAN PERSANDIAN

#### 1. Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

<b>Nama Indikator</b>	<b>Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah</b>
<b>Definisi</b>	<b>Indeks Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah</b> adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instansi pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) telah membangun kapasitas, sistem, dan tata kelola untuk melindungi informasi digitalnya dari risiko keamanan siber. Indeks ini menilai aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, sumber daya manusia, serta pelaksanaan teknis dan audit pengamanan informasi.
<b>Rumus Perhitungan</b>	$\text{Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi} = \frac{\sum (S_i \times B_i)}{\sum B_i}$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <math>S_i</math> = Skor dari indikator ke-i (biasanya dalam skala 0–5)</li> <li>□ <math>B_i</math> = Bobot dari indikator ke-i (persentase kontribusi indikator)</li> <li>□ <math>\sum (S_i \times B_i)</math> = Jumlah dari hasil perkalian skor dan bobot</li> <li>□ <math>\sum B_i</math> = Total bobot seluruh indikator (biasanya 100)</li> </ul>
<b>Interpretasi</b>	Indeks ini penting sebagai Alat ukur kesiapan pemda menghadapi serangan siber. Bahan evaluasi pembangunan sistem elektronik daerah. Acuan prioritas penguatan keamanan digital daerah (terutama layanan publik dan data strategis)
<b>Sumber Data</b>	Dokumen kebijakan TIK/SPBE daerah, Perkada, SK penanggung jawab keamanan
<b>Frekuensi</b>	Setap tahun (Tahunan)

## 2. Indeks SPBE (terkait keamanan)

Nama Indikator	Indeks SPBE (terkait keamanan)
<b>Definisi</b>	Indeks SPBE (Aspek Keamanan) adalah ukuran capaian tingkat kematangan keamanan informasi dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada instansi pemerintah. Indeks ini mencerminkan kemampuan instansi dalam melindungi aset informasi dari ancaman, gangguan, maupun risiko keamanan melalui kebijakan, infrastruktur, prosedur, dan pelaksanaan teknis keamanan siber.
<b>Rumus Perhitungan</b>	$\text{Indeks Keamanan SPBE} = \frac{\sum (S_i \times B_i)}{\sum B_i}$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <math>S_i</math> = Skor indikator ke-i pada aspek keamanan SPBE (rentang 0–5 atau 0–100, tergantung panduan evaluasi)</li> <li>□ <math>B_i</math> = Bobot indikator ke-i (menunjukkan tingkat pentingnya setiap indikator)</li> <li>□ <math>\sum (S_i \times B_i)</math> = Jumlah dari semua nilai bobot yang dikalikan dengan skor</li> <li>□ <math>\sum B_i</math> = Total bobot seluruh indikator keamanan</li> </ul>
<b>Interpretasi</b>	Indeks ini sangat penting untuk Menjamin <b>kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi pemerintah</b> . Menjadi dasar penguatan infrastruktur siber pemerintah. Mendukung layanan publik digital yang aman dan andal
<b>Sumber Data</b>	Dokumen internal instansi (Peraturan, Pedoman, SK Penanggung Jawab, SOP)
<b>Frekuensi</b>	Tahunan